

**ANALISIS KEMISKINAN MASYARAKAT MARITIM DI
DESA PERLIS KECAMATAN BERANDAN BARAT
KABUPATEN LANGKAT**

TUGAS AKHIR

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syaratat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Program Studi Ekonomi Pembangunan*



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Oleh:

Nama : DINI PRATIWI
NPM : 2105180010
Program Studi : Ekonomi Pembangunan

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**



PENGESAHAN UJIAN TUGAS AKHIR

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 21 April 2025, pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya.

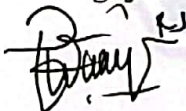
MEMUTUSKAN

Nama : DINI PRATIWI
NPM : 2105180010
Jurusan : EKONOMI PEMBANGUNAN
Judul : ANALISIS KEMISKINAN MASYARAKAT MARITIM DI
DESA PERLIS KECAMATAN BERANDAN BARAT
KABUPATEN LANGKAT

Dinyatakan : (A) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

Tim Penguji

Penguji I



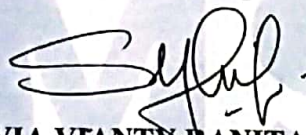
(Dr. PRAWIDYA HARIANI RS, S.E., M.Si.)

Penguji II



(Dra. ROSWITA HAFNI, S.E., M.Si.)

Pembimbing



(Dr. SYLVIA VIANTY RANITA, S.E., M.Si.)

Panitia Ujian

Ketua



Assoc. Prof. Dr. H. JANURI, S.E., M.M., M.Si., CMA

Sekretaris



(Assoc. Prof. Dr. ADE GUNAWAN, S.E., M.Si.)





PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Tugas Akhir ini disusun oleh :

Nama Lengkap : DINI PRATIWI
N.P.M : 2105180010
Program Studi : EKONOMI PEMBANGUNAN
Alamat : JL. KAPT. RAHMADBUDIN GG. PIPA LINK. 8
Judul Tugas Akhir : ANALISIS KEMISKINAN MASYARAKAT MARITIM DI
DESA PERLIS KECAMATAN BERANDAN BARAT
KABUPATEN LANGKAT

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan Tugas Akhir.

Medan, Maret 2025

Pembimbing Tugas Akhir

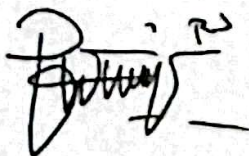


Dr. SYLVIA VIANTY RANITA, S.E., M.Si.

Diketahui/Disetujui
Oleh:

Ketua Program Studi
Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



Dr. PRAWIDYA HARIANI RS, S.E., M.Si.



Dr. H. JANURI, S.E., M.M., M.Si., CMA.

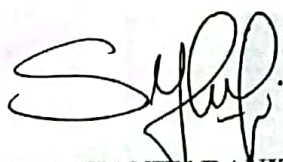
BERITA ACARA BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama Lengkap : DINI PRATIWI
N.P.M : 2105180010
Program Studi : EKONOMI PEMBANGUNAN
Alamat : JL. KAPT. RAHMADBUDIN GG. PIPA LINK. 8
Judul Tugas Akhir : ANALISIS KEMISKINAN MASYARAKAT MARITIM DI
DESA PERLIS KECAMATAN BERENDAN BARAT
KABUPATEN LANGKAT

Tanggal	Deskripsi Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
27/ 12 - 2024	1.) Penambahan landasan latar belakang 2.) Penegasan fenomena kemiskinan	sf	Bab I
15/ 01 - 2025	1.) Penambahan landasan teori pendukung 2.) Perbaikan kerangka konseptual	sf	Bab II
22/ 01 - 2025	1.) Penentuan penemuan yang detail 2.) Perubahan Analisis data	sf	Bab III
31/ 01 - 2025	1.) Penambahan hasil penelitian 2.) Perubahan Implikasi temuan peneliti	sf	Bab IV
04/ 02 - 2025	1.) Kesimpulan 2.) Perubahan saran	sf	Bab V
12/ 02 - 2025	1.) Penambahan sitasi 2.) Perbaikan halaman	sf	
24/ 02 - 2025	ACC u / Sidang Meja Hijau	sf	

Pembimbing Tugas Akhir

Medan, Maret 2025
Diketahui /Disetujui
Ketua Program Studi
Ekonomi Pembangunan



Dr. SYLVIA VIANITY RANITA, S.E., M.Si.



Dr. PRAWIDYA HARIANI RS, S.E., M.Si.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR



Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama Lengkap : DINI PRATIWI

N.P.M : 2105180010

Program Studi : EKONOMI PEMBANGUNAN

Alamat : JL. KAPT. RAHMADBUDIN GG. PIPA LINK. 8

**Judul Tugas Akhir : ANALISIS KEMISKINAN MASYARAKAT MARITIM DI
DESA PERLIS KECAMATAN BERENDAN BARAT
KABUPATEN LANGKAT**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri., kecuali pad bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Yang Menyatakan


DINI PRATIWI

ABSTRAK

ANALISIS KEMISKINAN MASYARAKAT MARITIM DI DESA PERLIS KECAMATAN BERANDAN BARAT KABUPATEN LANGKAT

DINI PRATIWI
NPM : 2105180010

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Jln. Kapten Muchtar Basri No. 3 Telp (061) 6624567 Medan 20238
Email : dinipratiwi1908@gmail.com

Kemiskinan merupakan permasalahan kompleks yang dihadapi oleh masyarakat maritim di Desa Perlis, Kecamatan Berandan Barat, Kabupaten Langkat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kemiskinan masyarakat nelayan, baik dari aspek ekonomi, sosial, maupun infrastruktur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, di mana data dikumpulkan melalui observasi langsung.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemiskinan masyarakat maritim di Desa Perlis disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan, keterbatasan akses terhadap modal usaha, minimnya pekerjaan alternatif, serta keterbatasan infrastruktur seperti jalan, listrik, dan air bersih. Selain itu, ketergantungan nelayan pada metode tradisional dalam menangkap ikan serta sistem pemasaran yang didominasi oleh tengkulak semakin memperburuk kondisi ekonomi mereka.

Upaya pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas, peningkatan akses pendidikan dan pelatihan keterampilan, serta pembangunan infrastruktur yang lebih baik menjadi solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi permasalahan ini. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pemerintah dan pemangku kepentingan dalam merancang kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat maritim.

Kata Kunci : Kemiskinan, Masyarakat Maritim, Desa Perlis, Nelayan, Infastrutur, Pemberdayaan Ekonomi.

ABSTRACT

POVERTY ANALYSIS OF MARITIME COMMUNITY IN PERLIS VILLAGE, BRANDAN BARAT DISTRICT, LANGKAT REGENCY

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Jln. Kapten Muchtar Basri No. 3 Telp (061) 6624567 Medan 20238
Email : dinipratiwi1908@gmail.com

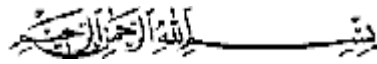
Poverty is a complex issue faced by maritime communities in Perlis Village, Berandan Barat District, Langkat Regency. This study aims to analyze the factors contributing to the poverty of fishing communities, including economic, social, and infrastructural aspects. The research employs a qualitative descriptive approach, with data collected through direct observation

The findings indicate that poverty among maritime communities in Perlis Village is driven by low levels of education, limited access to business capital, lack of alternative employment opportunities, and inadequate infrastructure such as roads, electricity, and clean water. Additionally, fishermen's reliance on traditional fishing methods and a marketing system dominated by middlemen further exacerbate their economic conditions.

Community-based economic empowerment, improved access to education and skills training, and enhanced infrastructure development are proposed as solutions to address these challenges. This study is expected to provide recommendations for policymakers and stakeholders in designing more effective policies to improve the welfare of maritime communities.

Keywords: Poverty, Maritime Community, Perlis Village, Fishermen, Infrastructure, Economic Empowerment

KATA PENGANTAR



Assalamua'laikum Warrahmatullah Wabarakatuh

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat karena berkat rahmat dan hidayah-Nyalah tugas akhir ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menerangi umat dari alam Jahiliyah kearah kehidupan yang penuh petunjuk. Penulisan tugas akhir adalah sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata satu (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Penulis menyadari bahwa tugas akhir masih jauh kurang dari kata sempurna dalam hal isi maupun pemakaian bahasa, sehingga penulis memohon kritikan yang membangun untuk penulisan selanjutnya.

Dengan pengetahuan dan pengalaman yang sangat terbatas akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul ***“ANALISIS KEMISKINAN MASYARAKAT MARITIM DI DESA PERLIS KECAMATAN BERANDAN BARAT KABUPATEN LANGKAT”***.

Berharap Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi pembaca serta dapat menambah ilmu pengetahuan bagi penulis sendiri, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada pihak yang langsung maupun tidak langsung terkait dalam penyelesaian Tugas Akhir ini. Berkat semua pihak yang telah memberikan dukungan kepada penulis sehingga Tugas Akhir ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari penyusunan Tugas Akhir ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan dan saran dari semua pihak. Penulis menyampaikan ucapan hormat dan terima kasih kepada :

1. Kepada kedua orang tua saya, Ayahanda Rudi Replianto dan Ibunda Tuti Handayani yang telah banyak memberikan cinta, kasih sayang, dukungan, semangat dan bantuan, baik bantuan materi maupun bantuan moral selama pembuatan Tugas Akhir ini serta doa yang tulus sehingga saya dapat melewati segala proses yang saya jalani.
2. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP, sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. H. Januri, S.E., M.M., M.Si, CMA sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
4. Bapak Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, S.E, M.Si. selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung, S.E., M.Si. selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Dr. Prawidya Hariani RS, S.E., M.Si sebagai Ketua Program Studi sekaligus Dosen Pembimbing Akademik Ekonomi Pembangunan yang telah memberi bimbingan, arahan dan nasihat kepada penulis dalam pembuatan Tugas Akhir ini.
7. Ibu Dra. Roswita Hafni, M.Si sebagai Sekretaris Program Studi Ekonomi Pembangunan yang telah memberi bimbingan, arahan dan

nasihat kepada penulis dalam pembuatan Tugas Akhir ini.

8. Ibu Dr. Sylvia Vianty Ranita, S.E., M.Si sebagai Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan serta arahan kepada penulis dalam pembuatan Tugas Akhir ini.
9. Ibu Hastina Febrianty, S.E., M.Si sebagai Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan serta arahan.
10. Kepada Bapak/Ibu Dosen Ekonomi Pembangunan yang telah membimbing dan memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis.
11. Seluruh Staf Biro Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah membantu penulis dalam pengurusan berkas-berkas yang dibutuhkan.
12. Kepada Abang dan Kakak saya Tercinta yaitu Irfan Hadi dan Jihan Febrianti yang sudah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis, semoga kita ber-3 bisa sukses bersama. Aamiin.
13. Kepada sahabat-sahabat seperjuangan saya di Hmj Ekonomi Pembangunan terkhususnya pada orang-orang yang bergabung di Ppk Ormawa 2024 yang tidak pernah berhenti membantu dan menghibur saya selama pembuatan Tugas Akhir ini.
14. Kepada sahabat penulis yaitu Citra, Jihan, Febby, Ingrid, Wana, Distia, Rohdearna, Thohir, Muda, Rinaldi, Nigo, dan Winda yang telah membantu serta memberikan semangat kepada penulis, semoga sukses untuk kita kedepannya.
15. Kepada teman-teman penulis kelas A Ekonomi Pembangunan yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah menghibur penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.

16. Dan terimakasih kepada diri saya sendiri, yang telah bertahan hingga saat ini disaat penulis tidak percaya terhadap dirinya sendiri, Namun penulis tetap mengingat bahwa setiap langkah kecil yang telah diambil adalah bagian dari perjalanan, meskipun terasa sulit atau lambat. Perjalanan menuju impian bukanlah lomba sprint, tetapi lebih seperti maraton yang memerlukan ketekunan, kesabaran, dan tekad yang kuat. Tugas akhir ini namun mampu menyelesaikan studi ini dengan tepat waktu, Terimakasih banyak sudah bertahan, terimakasih untuk selalu kuat, penulis berjanji bahwa saya akan baik- baik saja setelah ini dan semoga saya sukses dan selalu di mudahkan untuk kedepannya. Aamiin.

Akhir kata, penulis mengharapkan semoga Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya. Semoga Allah SWT memberikan balasan atas semua bantuan yang diberikan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, Januari 2025

penulis

DINI PRATIWI
NPM:21051800

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1.Latar Belakang.....	1
1.2. Identifikasi Masalah	5
1.3. Batasan Masalah	5
1.4. Rumusan Masalah	5
1.5. Tujuan Penelitian	6
1.6. Manfaat Penelitian	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	7
2.1.Landasan Teori	7
2.1.1. Ekonomi Regional	7
2.1.2. Teori Kemiskinan	19
2.2. Penelitian Terdahulu	43
2.3. Kerangka Konseptual	45
BAB III METODE PENELITIAN	48
3.1. Jenis Penelitian	48
3.2. Definisi Operasional.....	49
3.3. Tempat dan Waktu Penelitian.....	50
3.3.1. Tempat Penelitian	50
3.3.2. Waktu Penelitian	50
3.4. Teknik Pengumpulan Data	50
3.5. Teknik Analisis Data	51
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	52
4.1. Gambaran Umum.....	52
4.2. Hasil Observasi Lapangan	54

4.2.1. Kondisi Ekonomi Masyarakat Maritim	54
4.2.2. Kondisi Sosial Masyarakat	56
4.2.3. Kondisi Infastruktur dan Aksesibilitas	58
4.3. Pembahasan	59
4.4. Implikasi Temuan Penelitian	63
BAB V PENUTUP	67
5.1. Kesimpulan.....	67
5.2. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA.....	70

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	43
Tabel 3.1 Definisi Operasional.....	49

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Kondisi Desa Perlis.....	53
Gambar 4.2 Kondisi Jalan Desa Perlis.....	63

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan masalah global yang mempengaruhi berbagai lapisan masyarakat, termasuk masyarakat maritim yang menggantungkan hidup pada sektor pesisir dan perikanan. Di Indonesia, yang dikenal sebagai negara kepulauan, masyarakat maritim memegang peranan penting dalam mendukung perekonomian melalui kontribusi sektor perikanan dan kelautan. Namun, ironi ini terjadi ketika sebagian besar masyarakat maritim justru hidup dalam garis kemiskinan.

Kemiskinan masyarakat maritim di Desa Perlis, Kecamatan Berandan Barat, Kabupaten Langkat, merupakan isu yang kompleks dan memerlukan perhatian yang serius. Kondisi sosial dan ekonomi masyarakat nelayan di desa ini menunjukkan tantangan yang signifikan, seperti rendahnya akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang memadai. Hal ini yang berkontribusi pada tingkat kemiskinan yang tinggi.

Desa Perlis Berandan Barat terletak di pesisir timur Sumatera, tepatnya di Kecamatan Berandan Barat, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatra Utara. Desa ini memiliki karakteristik masyarakat maritim, yang mana sebagian besar penduduknya menggantungkan hidup pada sektor perikanan dan aktivitas ekonomi yang berhubungan dengan laut. Desa ini diapit oleh Samudra Hindia di sebelah timur dan terhubung dengan sungai-sungai kecil yang mengalir ke wilayah pesisir, sehingga memiliki akses yang baik terhadap sumber daya laut.

Meskipun wilayah ini memiliki potensi alam yang kaya, seperti sumber daya ikan yang melimpah, kenyataannya banyak warga Desa Perlis Berandan Barat yang masih hidup dalam kondisi di garis kemiskinan. Fenomena ini menjadi sorotan, karena meskipun masyarakat memiliki akses langsung terhadap sumber daya alam yang dapat menunjang kehidupan, kenyataannya mereka masih menghadapi berbagai tantangan yang membatasi kemampuan mereka untuk keluar dari jerat kemiskinan.

Masyarakat nelayan di Desa Perlis umumnya memiliki pendidikan yang rendah. Sebagian besar dari mereka tidak menyelesaikan pendidikan menengah atas, dengan banyak yang hanya memiliki pendidikan dasar atau bahkan tidak tamat SD. Hal ini berdampak pada kemampuan mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan meningkatkan pendapatan keluarga.

Tingkat kesejahteraan para pelaku perikanan (nelayan) pada saat ini masih dibawah sektor-sektor lain, termasuk sektor pertanian agraris. Nelayan (khususnya nelayan buruh dan nelayan tradisional) merupakan kelompok masyarakat yang dapat digolongkan sebagai lapisan sosial yang paling miskin diantara kelompok masyarakat lain disektor pertanian.

Dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang relatif berada dalam tingkat kesejahteraan rendah, maka dalam jangka panjang tekanan terhadap sumber daya pesisir akan semakin besar guna pemenuhan kebutuhan masyarakat pesisir. Banyak hal yang mempengaruhi kenapa ekonomi masyarakat nelayan desa Perlis menengah kebawah, diantaranya mahal nya kebutuhan pokok, hasil yang di peroleh dari bekerja sebagai nelayan kurang, tidak terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat seperti wajib belajar 9 Tahun.

Sebagian besar nelayan masih merupakan nelayan tradisional dengan karakteristik so-sial budaya yang memang belum kondusif untuk suatu kemajuan. Sekitar 60% dari 3,7 juta nelayan Indonesia tergolong miskin dan lebih dari 85% nelayan hanya berpendidikan SD, tidak tamat SD dan buta huruf. (Badan Pusat Statistik (BPS, 2009).

Kemiskinan yang dialami oleh masyarakat maritim sering kali mengakibatkan keterbatasan akses terhadap kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan, dan kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kemiskinan, yang dapat menjadi dasar untuk merumuskan program-program pengentasan kemiskinan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Dengan memahami karakteristik kemiskinan di Desa Perlis, pemerintah dan lembaga terkait dapat merancang intervensi yang lebih tepat sasaran.

Selain itu, infrastruktur yang kurang memadai di Desa Perlis juga menjadi kendala. Jalan yang rusak, akses listrik yang terbatas, dan kurangnya fasilitas kesehatan memperburuk kondisi hidup masyarakat. Keterbatasan infrastruktur ini mengurangi kemampuan masyarakat untuk mengakses pasar dan layanan dasar, sehingga memperparah kemiskinan.

Kebijakan pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan di kawasan maritim sering kali tidak terintegrasi dengan baik. Banyak program pembangunan yang tidak mempertimbangkan karakteristik spesifik masyarakat maritim, sehingga hasilnya kurang efektif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kebijakan yang ada dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan.

Analisis kemiskinan di masyarakat maritim, khususnya di Desa Perlis, perlu dilakukan untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi ekonomi

dan sosial mereka. Metode kualitatif dipilih dalam penelitian ini untuk menggali lebih dalam pengalaman, pandangan, dan persepsi masyarakat terhadap kemiskinan yang mereka alami. Dengan pendekatan ini, diperkirakan pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika kemiskinan di kalangan masyarakat maritim akan dihasilkan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan ekonomi mereka.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan terkait dalam upaya pengentasan kemiskinan di Desa Perlis serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat maritim secara keseluruhan. Selain itu, penelitian ini akan berfungsi sebagai referensi untuk penelitian lebih lanjut tentang kemiskinan masalah di daerah pesisir dan maritim Indonesia.

Kemiskinan nelayan merupakan masalah yang bersifat multidimensi sehingga untuk menyelesaikannya diperlukan solusi yang menyeluruh dan bukan solusi parsial (Hamdani, 2013). Terdapat beberapa aspek yang menyebabkan terpeliharanya kemiskinan nelayan di Desa Perlis diantaranya Kebijakan pemerintah yang belum tepat sasaran, banyak kebijakan yang bersifat top down dan selalu menjadikan masyarakat sebagai objek bukan subjek (Tarumingkeng, 2002).

Hasil penelitian dapat memberikan wawasan kepada pembuat kebijakan tentang kondisi nyata yang dihadapi oleh masyarakat nelayan. Kebijakan yang ada saat ini sering kali tidak memadai atau tidak tepat sasaran dalam menanggulangi masalah kemiskinan di kalangan masyarakat pesisir. Dengan data dan analisis

yang diperoleh dari penelitian ini, diharapkan kebijakan publik dapat diperbaiki untuk lebih mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat maritim.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **ANALISIS KEMISKINAN MASYARAKAT MARITIM DI DESA PERLIS KECAMATAN BERANDAN BARAT KABUPATEN LANGKAT**”.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang dapat disimpulkan bahwa Identifikasi dari penelitian ini adalah : Mencari penyebab utama kemiskinan di Desa Perlis dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi situasi ini.

1.3. Batasan Masalah

Pembatasan dalam penelitian ini merupakan fokus dalam pada faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di kalangan masyarakat maritim, seperti akses terhadap sumber daya, pendidikan, dan pekerjaan. Faktor-faktor eksternal yang lebih luas, seperti kebijakan pemerintah atau kondisi ekonomi makro, tidak akan menjadi fokus utama.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan masyarakat maritim di Desa Perlis?

1.5. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari kajian ini dilakukan untuk: Untuk, mengidentifikasi dan menganalisis faktor - faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan yang berkontribusi terhadap tingkat kemiskinan di masyarakat maritim Desa Perlis.

1.6. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan untuk :

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan khususnya dalam bidang ekonomi, sosiologi, dan studi maritim, dengan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang kemiskinan di masyarakat maritim. Selanjutnya penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti lain yang ingin melakukan studi lebih lanjut mengenai kemiskinan, masyarakat maritim, atau isu-isu sosial-ekonomi di daerah lain.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan informasi dan menambah khasanah keilmuan khususnya pengetahuan mengenai kebijakan yang lebih efektif dalam pengentasan kemiskinan di masyarakat maritim.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Ekonomi Regional

Ilmu ekonomi regional adalah suatu cabang dari ilmu ekonomi yang dalam pembahasannya memasukkan unsur perbedaan potensi suatu wilayah dengan wilayah lain. Sebetulnya sangat sulit meletakkan posisi ilmu ekonomi regional dalam kaitannya dengan ilmu lain, terutama dengan ilmu bumi ekonomi . Hal inilah yang menyebabkan banyak buku ilmu ekonomi tidak memberikan definisi tentang ilmu tersebut. Ilmu bumi ekonomi adalah ilmu yang mempelajari segala gejala-gejala dari suatu kegiatan yang bersangkutan paut dengan tempat atau lokasi sehingga ditemukan prinsip-prinsip penggunaan ruang yang berlaku umum. Prinsip-prinsip ini yang dipakai dalam membuat kebijakan pengaturan penggunaan ruang wilayah yang efektif dan efisien berdasarkan tujuan umum yang hendak dicapai.

Hal-hal yang dibahas dalam ilmu bumi ekonomi, antara lain mengenai teori lokasi. Ilmu ekonomi regional tidak membahas kegiatan individual melainkan menganalisis suatu wilayah (atau bagian wilayah) secara keseluruhan atau melihat berbagai wilayah dengan potensinya yang beragam dan bagaimana mengatur suatu kebijakan yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Ilmu ekonomi regional termasuk salah satu cabang yang baru dari ilmu ekonomi. Walter Isard adalah orang pertama yang dianggap dapat memberi wujud (landasan yang kompak) atas ilmu ekonomi regional, IER baru menunjukkan wujudnya setelah diterbitkannya disertasi Walter Isard di yang berjudul *Location*

and Space Economics pada tahun 1956. Walter Isard adalah orang yang pertama memberi kerangka landasan tentang apa saja yang dikategorikan ke dalam Regional Science, yang pada dasarnya adalah penerapan prinsip-prinsip ekonomi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi antar wilayah yang memiliki potensi yang berbeda. Ahli ekonomi menganggap hasil karya Walter Isard masuk kategori ilmu ekonomi regional, ilmu ekonomi ini baru masuk ke Indonesia pada awal tahun 1970-an karena pemerintah menyadari pentingnya pembangunan ekonomi daerah sebagai bagian dari cara untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Artinya, pemerintah mulai menyadari bahwa kebijakan ekonomi tidak boleh dibuat seragam untuk semua daerah, padahal kondisi dan potensi daerah itu tidak sama antara yang satu dengan yang lainnya.

Tujuan ilmu ekonomi regional sebetulnya tidak jauh berbeda dengan tujuan ilmu ekonomi pada umumnya. Tujuan utama kebijakan ekonomi adalah (1) *full employment*, (2) *economic growth* dan (3) *price stability*. Uraian tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Menciptakan *full employment* atau setidaknya tingkat pengangguran yang rendah menjadi tujuan pokok pemerintah pusat maupun daerah. Dalam kehidupan masyarakat, pekerjaan bukan saja berfungsi sebagai sumber pendapatan, tetapi sekaligus juga memberikan harga diri/status bagi yang bekerja.
2. Adanya *economic growth*, karena selain menyediakan lapangan kerja bagi angkatan kerja baru, juga diharapkan dapat memperbaiki kehidupan manusia atau peningkatan pendapatan. Tanpa perubahan, manusia merasa jenuh atau bahkan merasa tertinggal.

3. Terciptanya *price stability* untuk menciptakan rasa aman/tentram dalam perasaan masyarakat. Harga yang tidak stabil membuat masyarakat merasa waswas, misalnya apakah harta atau simpanan yang diperoleh dengan kerja keras, nilai riil atau manfaat berkurang di kemudian hari.

Ada di antara tujuan ekonomi yang tidak mungkin dilakukan daerah (permintaan daerah) apabila daerah itu bekerja sendiri untuk menstabilkan tingkat harga. Namun, apabila daerah itu dapat memenuhi tujuan pertama dan kedua, hal itu turut membantu pemerintah pusat untuk memenuhi tujuan ketiga. Namun di lain sisi, daerah karena wilayahnya yang lebih sempit dapat membuat kebijakan yang lebih bersifat spasial sehingga ada hal-hal yang dapat dilakukan oleh daerah secara lebih baik ketimbang oleh pemerintah pusat. Hal-hal yang bisa diatur di daerah secara lebih baik, yang merupakan tujuan pokok tambahan yaitu terjaganya kelestarian lingkungan hidup, pemerataan pembangunan dalam wilayah, penetapan sektor unggulan wilayah, membuat keterkaitan antarsektor yang lebih serasi dalam wilayah sehingga menjadi bersinergi dan berkesinambungan, dan pemenuhan kebutuhan pangan wilayah.

Manfaat ilmu ekonomi regional dapat dibagi menjadi dua yaitu manfaat makro dan manfaat mikro. Manfaat makro dapat dikemukakan ditinjau dari sudut pemerintah pusat masing-masing wilayah memiliki potensi wilayah yang berbeda, dari sudut potensi masing-masing wilayah memiliki keunggulan komparatif yang berbeda dan bisa dimanfaatkan untuk menetapkan skala prioritas yang berbeda untuk masing-masing wilayah. Dari sudut tingkat pendapatan, masing-masing wilayah memiliki tingkat pendapatan yang berbeda, wilayah dengan tingkat pendapatan rendah memiliki MPC (*marginal propensity to consume*) yang tinggi,

hal ini bisa digunakan untuk meningkatkan efek pengganda (*multiplier effect*) dari pengeluaran pemerintah pusat. Sedangkan manfaat mikro, ilmu ekonomi regional membantu perencana wilayah dalam menentukan dibagian wilayah mana suatu kegiatan/proyek itu sebaiknya di bangun, tetapi tidak sampai menunjuk lokasi konkret dari proyek tersebut. Dengan demikian, mungkin ada yang mempertanyakan apa manfaat IER, karena tidak mampu langsung menunjuk lokasi. Seorang perencana wilayah berhadapan dengan wilayah yang begitu luas. Apabila langsung ingin mendapat jawaban dimana site-nya, ia harus melakukan survey terhadap keseluruhan wilayah. Hal ini membutuhkan waktu dan biaya yang sangat besar, IER memiliki alat analisis yang bisa menunjukkan bagian wilayah mana kegiatan seperti itu memiliki keunggulan komparatif. Dengan demikian, bagian wilayah yang perlu di survey secara rinci di persempit untuk menghemat waktu dan biaya.

Menurut (Richardson, n.d.) mulai membicarakan ekonomi regional dengan lebih dahulu membahas teori untuk wilayah yang bersifat homogen kemudian dilanjutkan dengan membahas wilayah nodal. Dalam membahas daerah homogen juga dibicarakan berbagai teori pertumbuhan ekonomi wilayah. Teori pertumbuhan ekonomi wilayah dikutip dari teori ekonomi umum dengan modifikasi seperlunya agar lebih pas untuk membahas ekonomi wilayah. Ada pula teori yang dikembangkan khusus dalam ilmu ekonomi regional, seperti teori basis ekspor dan kaitan ekonomi antar wilayah. Dalam pembahasan daerah nodal, sebagian besar menggunakan materi yang dicakup dalam teori lokasi. Teori lokasi dikembangkan oleh para ahli ilmu bumi ekonomi namun jangan di lupakan bahwa

teori lokasi pada mulanya dibangun oleh para ekonomi kemudian dikembangkan oleh para *geographer* dengan tetap menggunakan prinsip-prinsip ekonomi.

(Hoover, 1997) umumnya menggunakan pandangan teori ekonomi umum yang digunakan untuk menganalisis potensi ekonomi wilayah dan hubungan ekonomi antar wilayah.

(Bendavid-Val, 1974) memulai dengan materi yang umumnya tercakup dalam teori ekonomi makro seperti teori nilai tambah dan analisis input-output yang diterapkan untuk ekonomi wilayah dan kemudian dilanjutkan dengan teori yang khusus dikembangkan dalam ilmu ekonomi regional seperti analisis *shift-share* dan teori basis ekspor.

A. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indikator yang paling luas digunakan untuk mengukur status komparatif pembangunan sosio ekonomi disajikan dalam laporan-laporan tahunan UNDP yang berjudul Human Development Report (Laporan Pembangunan Manusia) pada tahun 1996 yang kemudian berlanjut setiap tahun. Inti semua laporan ini yang dimulai tahun 1990 adalah pembuatan penyempurnaan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) / Human Development Index (HDI) (Todaro & Smith, 2013). Dalam publikasi ini pembangunan manusia didefinisikan sebagai “a process of enlarging people’s choices” atau proses yang meningkatkan aspek kehidupan masyarakat. Aspek terpenting kehidupan ini dilihat dari usia yang panjang dan hidup sehat, tingkat pendidikan yang memadai, dan standar hidup yang layak. Secara spesifik UNDP menetapkan empat elemen utama dalam pembangunan manusia, yaitu produktivitas (*productivity*), pemerataan (*equity*), keberlanjutan (*sustainability*) dan pemberdayaan (*empowerment*).

Menurut UNDP, Indeks Pembangunan Manusia mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar kualitas hidup mencakup:

1. Umur panjang dan Sehat

Untuk mengukur dimensi umur panjang dan sehat digunakan Angka Harapan Hidup (AHH) yang merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup . perhitungan angka harapan hidup melalui pendekatan tak langsung (*indirect estimation*). Jenis data yang digunakan adalah Anak Lahir Hidup (ALH) dan Anak Masih Hidup (AMH), indeks harapan hidup dihitung dengan menghitung nilai maksimum dan nilai minimum harapan hidup sesuai standar UNDP yaitu angka yang tertinggi sebagai batas atas untuk penghitungan indeks dipakai 85 tahun dan terendah adalah 25 tahun.

2. Pengetahuan

Untuk mengukur dimensi pengetahuan yang diukur melalui tingkat pendidikan, dalam hal ini indikator yang digunakan adalah rata-rata lama sekolah (*mean years of schooling*) dan angka melek huruf. Pada proses pembentukan IPM, rata-rata lama sekolah memiliki bobot sepertiga dan angka melek huruf diberi bobot dua pertiga. Kemudian penggabungan kedua indikator ini digunakan sebagai indeks pendidikan sebagai salah satu komponen pembentukan IPM. Rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Penghitungan rata-rata lama sekolah menggunakan dua batasan yang dipakai sesuai kesepakatan

beberapa negara. Rata-rata lama sekolah memiliki batas maksimumnya 15 tahun dan batas minimum 0 tahun.

Angka melek huruf adalah persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin dan atau huruf lainnya. Seperti halnya rata-rata lama sekolah angka melek huruf juga menggunakan batasan yang dipakai sesuai kesepakatan beberapa negara. Batas maksimum untuk angka melek huruf adalah 100, sedangkan batas minimumnya adalah 0. Nilai 100 menggambarkan kondisi 100% atau semua masyarakat mampu membaca dan menulis sedangkan nilai 0 mencerminkan kondisi sebaliknya.

3. Standar Hidup Layak

Dimensi lain dari ukuran kualitas hidup manusia adalah standar hidup yang layak. Dalam cakupan lebih luas, standar hidup layak menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi. Indikator ini juga dipengaruhi lebih pengetahuan serta peluang yang ada untuk merealisasikan pengetahuan dalam berbagai kegiatan produktif sehingga menghasilkan output baik berupa barang maupun jasa sebagai pendapatan, kemudian pendapatan yang ada menciptakan pengeluaran atau konsumsi. Pengeluaran perkapita memberikan gambaran tingkat daya beli PPP (*Purchasing Power Parity*) masyarakat dan sebagai salah satu komponen yang digunakan dalam melihat status pembangunan manusia di suatu wilayah. Sebelum penghitungan IPM, setiap komponen harus di hitung indeksnya, formula yang digunakan dalam penghitungan indeks komponen IPM adalah sebagai berikut:

$$\text{Indeks } X(i) = \frac{x(i) - x(\min)}{x(\max) - x(\min)} \dots \dots \dots (2.4)$$

Keterangan: (i) = Komponen IPM ke-i

(min) = Nilai minimum dari komponen IPM ke-i

(maks) = Nilai maksimum dari komponen IPM ke-i

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi salah satu indikator yang penting dalam melihat sisi lain dari pembangunan. Manfaat penting IPM antara lain yaitu yang pertama, IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/ penduduk), kedua IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/ negara, ketiga bagi Indonesia IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Desa (DAU)(www.ipm.bps.go.id).

Untuk melihat capaian IPM antar wilayah dapat dilihat melalui pengelompokkan IPM ke dalam beberapa kategori yaitu:

1. $IPM < 60$: IPM rendah
2. $60 \leq IPM \leq 70$: IPM sedang
3. $70 \leq IPM \leq 80$: IPM tinggi
4. $IPM \geq 80$: IPM sangat tinggi

IPM yang lebih kecil maka dikategorikan sebagai wilayah dengan IPM rendah. Untuk IPM brsekitar antara 60 samppai 70 maka dikategorikan sebagai wilayah dengan IPM sedang. Akan tetapi, jika IPM bersekitar 70 sampai dengan 80 dikategorikan termasuk IPM tinggi. Sedangkan, untuk yang memiliki IPM yang 80 keatas maka wilayah tersebut termasuk memiliki IPM yang sangat tinggi (www.ipm.bps.go.id).

B. Indeks Pembangunan Desa (IPD)

Indeks pembangunan desa merupakan suatu ukuran yang disusun untuk menilai tingkat kemajuan atau perkembangan desa-desa di Indonesia. Pengukuran IPD dibangun dari data hasil pendataan Potensi Desa (podes) yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik pada Mei 2018. Melalui komponen penyusunannya, IPD dapat digunakan untuk mengidentifikasi kondisi pembangunan desa yang mencakup lima dimensi dan 42 indikator yang menggambarkan ketersediaan dan aksesibilitas pelayanan pada masyarakat desa.

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, desa perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, dan mandiri. Desa yang mandiri dapat menciptakan landasan yang kokoh dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, Makmur dan sejahtera. Pelaksanaannya diatur dalam RPJMN 2015-2019 yang merupakan desa menjadi sasaran kemajuan wilayah. Tujuannya untuk, (1) memetakan kondisi desa di Indonesia berdasarkan tingkat pengembangannya, (2) menetapkan target pembangunan dalam 5 tahun kedepan yang harus dicapai secara bersama-sama oleh para pelaku pembangunan desa, (3) memotret kinerja pembangunan yang sudah dilaksanakan di desa. Mewujudkan amanah tersebut, diperlukan ukuran yang diwujudkan dalam Indeks Pembangunan Desa (IPD). Melalui IPD, pembangunan desa target RPJMN 2015-2019 mengamanahkan berkurangnya desa tertinggal sebanyak 5.000 desa, serta peningkatan desa mandiri sebanyak 2.000 desa. Atas dasar tersebut maka desa diklasifikasikan berdasarkan IPD menjadi Desa Mandiri, Desa Berkembang dan Desa Tertinggal di seluruh provinsi di

Indonesia disertai dengan informasi untuk masing-masing dimensi dan indikator penyusunnya.

Sumber data pengukuran IPD memerlukan dua sumber data yaitu daftar desa dan data desa yang digunakan pada penghitungan IPD 2018 bersumber dari hasil pendataan podes 2018 yang dilakukan secara sensus di seluruh wilayah administrasi terkecil setingkat desa di Indonesia. Pembangunan desa merupakan konsep multidimensional yang kompleks. Pengukuran tingkat kemajuan pembangunan desa diharapkan tetap mengacu pada kompleksitas tersebut meskipun perlu di upayakan adanya penyederhanaan dalam hal instrumen dan teknis pengukurannya. Dimensi, variabel, dan indikator yang digunakan sebagai alat ukur konsep pembangunan desa perlu disusun secara teliti sehingga secara komposit akan mampu menggambarkan tingkat kemajuan dan perkembangan pembangunan desa yang di potret pada suatu waktu. Dimensi Indeks Pembangunan Desa terbagi menjadi 5 bagian, yaitu :

1. Pelayanan Dasar

Dimensi pelayanan dasar mewakili aspek pelayanan dasar untuk mewujudkan bagian dari kebutuhan dasar, khusus untuk pendidikan dan kesehatan. Variabel sebagai komponen penyusunnya meliputi ketersediaan dan akses terhadap fasilitas pendidikan seperti TK, SD, SMP, dan SMA serta ketersediaan akses terhadap fasilitas kesehatan seperti Rumah sakit, Rumah sakit bersalin, Puskesmas/Pustu, tempat praktek dokter, Poliklinik/Balai pengobatan, tempat praktek bidan, Poskesdes, Polindes, dan Apotek.

2. Kondisi Infrastruktur

Dimensi kondisi infrastruktur mewakili kebutuhan dasar, prasarana pengembangan ekonomi lokal dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan dengan memisahkan aspek aksesibilitas/transportasi. Variabel-variabelnya penyusunannya mencakup (1) ketersediaan infrastruktur ekonomi seperti pertokoan, minimarket, toko kelontong, pasar, restoran, rumah makan, maupun warung/kedai makanan, akomodasi hotel atau penginapan serta bank, (2) infrastruktur energi seperti listrik, penerangan jalan dan bahan bakar untuk memasak, (3) ketersediaan infrastruktur air bersih dan sanitasi seperti sumber air minum, sumber air mandi/cuci, dan fasilitas buang air besar, (4) ketersediaan dan kualitas infrastruktur komunikasi dan informasi seperti komunikasi menggunakan telepon seluler, internet, dan pengiriman pos/barang.

3. Dimensi Aksesibilitas/Transportasi

Dimensi ini memiliki kekhususan dan prioritas pengembangan desa sebagai penghubung kegiatan sosial ekonomi dalam desa. Variabel penyusunnya meliputi, (1) ketersediaan dan akses terhadap sarana transportasi seperti listrik dan kualitas jalan, (2) aksesibilitas jalan, ketersediaan dan operasional angkutan umum serta (3) aksesibilitas transportasi seperti waktu tempuh per kilometer transportasi ke kantor camat, waktu tempuh per kilometer ke kantor bupati

4. Dimensi Pelayanan Umum

Dimensi pelayanan umum merupakan upaya pemenuhan kebutuhan pelayanan aspek lingkungan dan aspek pemberdayaan masyarakat. Variabel-variabel penyusunnya mencakup penanganan kesehatan masyarakat seperti

penanganan kejadian luar biasa dan penanganan gizi buruk, serta ketersediaan fasilitas olahraga.

5. Dimensi Penyelenggaraan Pemerintah

Dimensi ini mewakili indikasi kinerja pemerintah desa yang merupakan bentuk pelayanan administratif yang diselenggarakan pemerintah untuk pelayanan bagi warga. Variabel-variabel penyusunnya meliputi kemandirian seperti kelengkapan pemerintah desa, otonomi desa, dan asset/kekayaan desa serta kualitas sumber daya manusia

C. Indeks Desa Membangun (IDM)

Pengakuan dan penghormatan negara kepada desa yang disertai dengan redistribusi sumber daya dan kewenangan pembangunan secara penuh sebagaimana mandat UU Nomor 6 Tahun 2014, memberikan tanda yang jelas bahwa dari situlah desa harus menjadi tumpuan untuk membangun Indonesia. Indeks Desa Membangun lebih komprehensif jika dibandingkan dengan Indeks Pembangunan Desa karena mengedepankan pendekatan yang bertumpu kepada kekuatan sosial, ekonomi, dan ekologi, tanpa melupakan kekuatan politik, budaya, sejarah, dan kearifan lokal guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang ada guna mengurangi angka kemiskinan.

Dalam konteks tipologi desa, Indeks Desa membangun mengklasifikasikan desa dalam lima status yaitu, (1) Desa sangat tertinggal, (2) Desa tertinggal, (3) Desa berkembang, (4) Desa maju dan (5) Desa Mandiri. Dari kelima klasifikasi tersebut maka kini strata desa sudah memiliki beberapa pembagian yang digunakan sebagai indikator atau parameter desa. Tipologi pembagian Indeks Desa membangun dapat dibagi ke beberapa hal seperti, (i) Desa

sangat tertinggal: $< 0,491$; (ii) Desa tertinggal: $> 0,491$ dan $< 0,599$; (iii) Desa berkembang: $> 0,599$ dan $< 0,707$; (iv) Desa maju: $> 0,707$ dan $< 0,815$; (v) Desa mandiri: $> 0,815$. Tipologi tersebut sejalan dengan Permendes No.6 Tahun 2016 yang mengatur peta pembangunan desa. Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan indeks komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks yaitu:

1. Indeks Ketahanan Sosial
2. Indeks Ketahanan Ekonomi
3. Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan.

Perangkat indikator yang dikembangkan dalam Indeks Desa Membangun dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan dimana aspek sosial, ekonomi dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensinya serta kemampuan desa untuk mensejahterakan kehidupan desa. Kebijakan dan aktivitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa harus menghasilkan pemerataan dan keadilan, didasarkan dan memperkuat nilai-nilai lokal dan budaya serta ramah lingkungan dengan mengelola potensi sumber daya alam secara baik dan berkelanjutan. Dalam konteks ini ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi bekerja sebagai dimensi yang memperkuat gerak proses dan pencapaian tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

2.1.2. Teori Kemiskinan

Kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik berupa pangan, sandang, maupun papan.

Kemampuan pendapatan yang rendah ini juga akan berdampak berkurangnya kemampuan untuk memenuhi standar hidup rata-rata seperti standar kesehatan masyarakat dan standar pendidikan (Subandi, 2014).

Menurut Arsyad (2010) kemiskinan itu bersifat multi dimensional. Artinya karena kebutuhan manusia itu bermacam-macam, maka kemiskinan pun memiliki banyak aspek. Jika kita melihat dari perspektif kebijakan umum, kemiskinan meliputi dua aspek utama, yaitu aspek primer dan aspek sekunder. Aspek primer melibatkan kekurangan sumber daya esensial seperti pangan, sandang, dan papan, sementara aspek sekunder mencakup ketidakmampuan individu atau kelompok dalam mengakses jaringan sosial, sumber daya keuangan, dan informasi. Dimensi-dimensi kemiskinan ini tercermin dalam berbagai bentuk kekurangan, seperti kekurangan gizi, kurangnya akses air bersih dan perumahan yang layak, kualitas perawatan kesehatan yang buruk, serta tingkat pendidikan yang rendah. Dalam konteks ini, kemiskinan tidak hanya dipahami sebagai keterbatasan ekonomi semata, tetapi juga sebagai kondisi yang mempengaruhi keseluruhan kesejahteraan dan kehidupan individu atau kelompok yang terpinggirkan dalam masyarakat. Oleh karena itu, upaya untuk mengatasi kemiskinan tidak hanya memerlukan intervensi ekonomi, tetapi juga intervensi yang bersifat holistik dan menyeluruh.

Kemiskinan adalah sebuah istilah yang merujuk pada kondisi kurangnya kebahagiaan dan kepuasan dalam kehidupan, serta kekurangan dalam pemenuhan kebutuhan dasar yang tidak dapat dibandingkan dengan standar yang dianggap memadai (Safri, 2018). Definisi kemiskinan mencakup berbagai dimensi, termasuk hilangnya kemampuan untuk menjaga kesehatan fisik dan mental, serta

ketidakmampuan dalam mengakses sumber daya dan peluang pembangunan. Situasi ekonomi yang terkait dengan kemiskinan sering kali menggambarkan keterbatasan dalam pilihan dan peluang yang dimiliki oleh individu atau kelompok dalam memperoleh sumber daya yang diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan memperbaiki kondisi hidup mereka. Dengan demikian, kemiskinan bukan hanya sekadar masalah ekonomi, tetapi juga merupakan masalah sosial yang kompleks yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan individu dan masyarakat secara keseluruhan.

Untuk mengatasi masalah kemiskinan di suatu Negara, diperlukan pemahaman pengertian kemiskinan. Oleh sebab itu, BPS membuat standar kemiskinan antara lain:

- a. Tidak miskin, adalah mereka yang memiliki pengeluaran per orang per bulan $> \text{Rp. } 350.610$.
 - b. Hampir tidak miskin, pengeluaran per bulan per orang antara $\text{Rp. } 280.488 - \text{Rp. } 350.610$.
 - c. Hampir miskin, pengeluaran per bulan per orang $\text{Rp. } 233.740 - \text{Rp. } 280.488$.
 - d. Miskin, pengeluaran per orang per bulan $< \text{Rp. } 233.740$.
5. Sangat miskin, pengeluaran per orang per bulan tidak diketahui secara pasti.

Kriteria kemiskinan tersebut menyoroti fakta bahwa jumlah keluarga yang terjerat dalam kemiskinan di Indonesia masih cukup signifikan, dengan angka kemiskinan lebih merata di wilayah pedesaan daripada di perkotaan. Hal ini mengindikasikan adanya ketimpangan dalam distribusi kesejahteraan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Faktor-faktor seperti jumlah anak yang banyak

dalam satu keluarga, rendahnya tingkat pendidikan, serta akses terbatas terhadap layanan kesehatan menjadi beberapa penyebab utama kemiskinan di pedesaan. Kondisi ini mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat pedesaan dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka, serta memperkuat urgensi untuk mengimplementasikan program-program pembangunan dan pemberdayaan yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kesenjangan antarwilayah. Kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis (Meliala, 2012).

Berdasarkan beragam definisi yang ada, kajian mengenai kemiskinan terus dikaji ulang dan diperluas untuk mempertimbangkan permasalahan-permasalahan dan faktor-faktor yang menjadi penyebab utama kemiskinan. Salah satu definisi yang semakin mendapat perhatian, terutama dalam konteks program-program pengentasan kemiskinan di negara-negara berkembang, adalah definisi yang dikemukakan oleh Chambers. Definisi tersebut menekankan pentingnya memahami kemiskinan dalam konteks multidimensional, yang melibatkan tidak hanya aspek ekonomi, tetapi juga aspek sosial, budaya, dan lingkungan. Dengan memperluas cakupan definisi kemiskinan ini, diharapkan upaya pengentasan kemiskinan dapat lebih efektif dan tepat sasaran, serta mampu menciptakan dampak yang berkelanjutan bagi masyarakat yang terpinggirkan. Oleh karena itu, definisi kemiskinan yang holistik dan multidimensional seperti yang dikemukakan oleh Chambers telah menjadi fokus utama dalam pembangunan kebijakan dan program-program intervensi di berbagai belahan dunia. Chambers dalam Subandi (2014) menyatakan bahwa definisi kemiskinan adalah suatu kesatuan konsep (*integrated concept*) yang memiliki lima dimensi yaitu:

1) Kemiskinan (*Poverty*)

Kemiskinan adalah kondisi ketidakmampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok tidak hanya pada kelompok yang tidak memiliki pendapatan, akan tetapi dapat berlaku pada kelompok yang telah memiliki pendapatan namun tidak mampu mencukupi kebutuhannya.

2) Ketidakberdayaan (*Powerless*)

Rendahnya kemampuan pendapatan akan berdampak pada kekuatan sosial (*social power*) dari seseorang atau kelompok orang terutama dalam memperoleh keadilan ataupun persamaan hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan.

3) Kerentanan Menghadapi Situasi Darurat (*State of Emergency*)

Seseorang atau sekelompok orang yang disebut miskin tidak memiliki kemampuan untuk menghadapi situasi yang tidak terduga, dimana situasi ini membutuhkan alokasi pendapatan yang cukup untuk menyelesaikannya.

4) Ketergantungan (*Dependence*)

Lemahnya kekuatan sosial dari seseorang atau kelompok orang yang disebut miskin menyebabkan tingkat ketergantungan terhadap pihak lain adalah sangat tinggi.

5) Keterasingan (*Isolation*)

Dimensi ketersaingan yang dimaksudkan oleh Chambers adalah faktor-faktor yang menyebabkan seseorang atau sekelompok orang menjadi miskin. Umumnya kondisi ini berada pada daerah yang jauh dari pusat pertumbuhan ekonomi.

Dengan demikian, menjadi jelas bahwa masyarakat yang terjebak dalam kemiskinan adalah mereka yang terus-menerus menghadapi kondisi di mana mereka tidak memiliki daya untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Hal ini mencakup ketidakmampuan mereka dalam beberapa aspek, termasuk (1) kekurangan dalam kemampuan untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi yang menghasilkan, (2) kesulitan dalam mengakses sumber daya sosial dan ekonomi yang tersedia, dan (3) kesulitan untuk mengatasi kondisi mental dan norma budaya yang merugikan yang memelihara siklus kemiskinan, sehingga mengakibatkan penurunan martabat dan harga diri.

2.1.2.1 Bentuk dan Jenis Kemiskinan

Masalah kemiskinan dan faktor penyebabnya mengilhami pandangan yang lebih luas dalam ilmu pengetahuan bahwa kemiskinan tidak hanya terbatas pada ketidakmampuan seseorang atau sekelompok orang dalam memenuhi kebutuhan dasar. Sebaliknya, kemiskinan dipahami sebagai masalah yang bersifat multidimensional, yang melibatkan berbagai aspek kehidupan termasuk, namun tidak terbatas pada, aspek ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Ini menunjukkan bahwa penanganan kemiskinan memerlukan pendekatan multidimensional. Berdasarkan permasalahan tersebut kemiskinan memiliki 4 bentuk yakni sebagai berikut:

1. Kemiskinan Absolut

Kemiskinan Absolut adalah suatu kondisi dimana pendapatan seseorang atau sekelompok orang berada dibawah garis kemiskinan, sehingga kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan standar untuk

pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan pendidikan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup.

2. Kemiskinan Relatif

Kemiskinan relatif diartikan sebagai bentuk kemiskinan yang terjadi karena adanya pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau keseluruhan lapisan masyarakat sehingga menyebabkan adanya ketimpangan pendapatan atau ketimpangan standar kesejahteraan.

3. Kemiskinan Kultural

Kemiskinan tidak hanya merujuk pada kondisi material, tetapi juga melibatkan aspek-aspek non-material seperti sikap, gaya hidup, nilai-nilai, dan orientasi sosial budaya seseorang atau masyarakat. Hal ini mencakup pola pikir dan perilaku yang tidak sejalan dengan etos kemajuan masyarakat modern, sehingga melampaui sekadar keterbatasan ekonomi semata. Dalam konteks ini, kemiskinan juga dapat diinterpretasikan sebagai ketidakmampuan untuk mengadopsi atau berpartisipasi dalam perubahan sosial, ekonomi, atau budaya yang diperlukan untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan yang lebih baik.

4. Kemiskinan Struktural

Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumberdaya yang pada umumnya terjadi pada suatu tatanan sosial budaya ataupun sosia politik yang kurang mendukung adanya pembebasan kemiskinan.

5. Kemiskinan Alamiah

Kemiskinan alamiah adalah kemiskinan yang terbentuk sebagai akibat adanya kelangkaan sumber daya alam dan minimnya sarana umum (jalan raya, listrik, air bersih). Umumnya kondisi ini dialami oleh daerah yang belum terjangkau oleh pembangunan sehingga menjadi daerah tertinggal.

6. Kemiskinan Buatan

Adalah kemiskinan yang diakibatkan oleh sistem modernisasi atau kemiskinan yang membuat masyarakat sulit untuk menguasai sumber daya alam, sarana umum, dan fasilitas ekonomi secara merata.

Dari penjelasan bentuk kemiskinan seperti yang telah dijelaskan diatas dapat dipahami bahwa kemiskinan yang merupakan ketidakberdayaan dan ketidakmampuan mampu menumbuhkan perilaku dan mentalitas miskin yang bermuara pada hilangnya kemerdekaan dalam berusaha dan menikmati kesejahteraan secara bermartabat.

2.1.2.2 Faktor Penyebab Kemiskinan

Menurut Sharp dalam (Kuncoro, 2006) terdapat tiga faktor penyebab kemiskinan jika dipandang dari sisi ekonomi.

1. Kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumberdaya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumberdaya yang terbatas dan kualitasnya rendah.
2. Kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumberdaya manusia. Kualitas sumberdaya manusia yang rendah berarti

produktifitanya rendah, yang pada gilirannya upahnya rendah. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia ini karena rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi atau keturunan.

3. Kemiskinan muncul karena perbedaan akses dalam modal. Menurut Rencana Kerja Pemerintah Bidang Prioritas Penanggulangan Kemiskinan, penyebab kemiskinan adalah pemerataan pembangunan yang belum menyebar secara merata terutama di daerah pedesaan.

Kesempatan berusaha di daerah pedesaan dan perkotaan belum sepenuhnya dapat menghasilkan pendapatan yang memadai bagi masyarakat, terutama bagi rumah tangga yang hidup dalam kemiskinan. Masih terdapat sejumlah faktor yang menyebabkan hal ini, salah satunya adalah akses terbatas terhadap pelayanan dan fasilitas dasar seperti pendidikan, layanan kesehatan, air minum, sanitasi, dan transportasi. Kurangnya aksesibilitas ini menjadi hambatan utama bagi masyarakat miskin untuk mengambil manfaat dari peluang ekonomi yang ada.

Selain itu, program bantuan sosial yang ditujukan kepada masyarakat miskin juga belum mencapai tingkat yang memadai. Meskipun ada upaya dalam memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan, namun cakupan dan jumlah bantuan tersebut masih jauh dari cukup. Begitu pula dengan pelayanan bantuan yang ditujukan kepada kelompok rentan seperti penyandang cacat, lanjut usia, dan yatim-piatu. Meskipun ada program-program bantuan yang tersedia, namun masih terdapat kekurangan dalam mencakup semua kelompok yang membutuhkan.

Jaminan sosial bagi rumah tangga miskin juga masih belum memadai. Meskipun ada upaya untuk memberikan perlindungan sosial kepada mereka, namun cakupan dan kualitas jaminan sosial masih jauh dari optimal. Oleh karena itu, masih dibutuhkan upaya yang lebih besar dan berkelanjutan dalam meningkatkan aksesibilitas terhadap pelayanan dasar, memperluas cakupan dan kualitas program bantuan sosial, serta memperkuat jaminan sosial bagi rumah tangga miskin guna mengatasi tantangan kemiskinan yang terus menghantui masyarakat..

Menurut (Hartomo & Aziz dalam Laksono., 2021) terdapat beberapa faktor penyebab timbulnya kemiskinan adalah sebagai berikut:

1. Pendidikan yang Terlampau Rendah

Tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan seseorang kurang mempunyai keterampilan tertentu yang diperlukan dalam kehidupannya. Keterbatasan pendidikan atau keterampilan yang dimiliki seseorang menyebabkan keterbatasan kemampuan seseorang untuk masuk dalam dunia kerja.

2. Malas Bekerja

Adanya sikap malas (bersikap pasif atau bersandar pada nasib) menyebabkan seseorang bersikap acuh tak acuh dan tidak bergairah untuk bekerja.

3. Keterbatasan Sumber Daya Alam

Suatu masyarakat akan dilanda kemiskinan apabila sumber alamnya tidak lagi memberikan keuntungan bagi kehidupan mereka. Hal

ini sering dikatakan masyarakat itu miskin karena sumber daya alamnya miskin.

4. Terbatasnya Lapangan Kerja

Keterbatasan lapangan kerja akan membawa konsekuensi kemiskinan bagi masyarakat. Secara ideal seseorang harus mampu menciptakan lapangan kerja baru sedangkan secara faktual hal tersebut sangat kecil kemungkinannya bagi masyarakat miskin karena keterbatasan modal dan keterampilan.

5. Keterbatasan Modal

Seseorang miskin sebab mereka tidak mempunyai modal untuk melengkapi alat maupun bahan dalam rangka menerapkan keterampilan yang mereka miliki dengan suatu tujuan untuk memperoleh penghasilan.

6. Beban Keluarga

Seseorang yang mempunyai anggota keluarga banyak apabila tidak diimbangi dengan usaha peningkatan pendapatan akan menimbulkan kemiskinan karena semakin banyak anggota keluarga akan semakin meningkat tuntutan atau beban untuk hidup yang harus dipenuhi.

2.1.2.3 Indikator Kemiskinan

Indikator kemiskinan adalah ukuran seberapa miskin seseorang atau masyarakat. Selain indikator yang ditetapkan oleh pemerintah, tidak ada indikator yang benar-benar tepat dan sesuai untuk menggambarkan kondisi kemiskinan yang dapat diterapkan secara umum dan baku terhadap semua komunitas, bukan hanya dari segi ekonomi tetapi juga dari segi sosial, hukum, dan politik.

Tiga faktor dapat memengaruhi penentuan batas minimum pendapatan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pokok (yang kemudian dikenal sebagai garis kemiskinan):

1. persepsi manusia tentang kebutuhan pokok yang diperlukan
2. posisi manusia dalam lingkungannya
3. dan kebutuhan obyektif manusia untuk hidup secara manusiawi.

Pendapat ini menunjukkan bahwa tidak ada standar yang dapat digeneralisir untuk semua kelompok masyarakat tentang cara menetapkan suatu kondisi atau situasi sebagai masalah kemiskinan. Oleh karena itu, banyak indikator yang masih berlaku dan digunakan untuk menentukan suatu kondisi sebagai masalah kemiskinan masih digunakan.

Menurut (Suryawati, 2005) menyatakan bahwa di Indonesia, ada beberapa metode untuk tingkat kemiskinan, yaitu:

a) Badan Pusat Statistik (BPS)

Tingkat kemiskinan didasarkan kepada jumlah rupiah konsumsi berupa makanan yaitu kurang dari 2100 kalori per orang per hari (dari 52 jenis komoditi yang dianggap mewakili pola konsumsi penduduk yang berada di lapisan bawah), dan konsumsi non makanan (dari 45 jenis komoditi makanan sesuai kesepakatan nasional dan tidak dibedakan antara wilayah pedesaan dan perkotaan).

b) Sajogyo

Tingkat kemiskinan didasarkan jumlah rupiah pengeluaran rumah tangga yang disertakan dengan jumlah kilogram konsumsi beras per orang per tahun dan dibagi wilayah pedesaan dan perkotaan.

Daerah pedesaan:

- 1) Miskin, bila pengeluaran keluarga lebih kecil dari pada 320 kg nilai tukar beras per orang per tahun.
- 2) Miskin sekali, bila pengeluaran keluarga lebih kecil dari pada 240 kg nilai tukar beras per orang per tahun.
- 3) Paling miskin: bila pengeluaran keluarga lebih kecil dari pada 180 kg nilai tukar beras per orang per tahun.

Daerah perkotaan:

- 1) Miskin: bila pengeluaran keluarga lebih kecil dari pada 480 kg nilai tukar beras per orang per tahun.
- 2) Miskin sekali: bila pengeluaran keluarga lebih kecil dari pada 380 kg nilai tukar beras per orang per tahun.
- 3) Paling miskin: bila pengeluaran keluarga lebih kecil dari pada 270 kg nilai tukar beras per orang per tahun.

C. Bank Dunia mengukur garis kemiskinan berdasarkan pada pendapatan seseorang kurang dari USS 1 per hari.

2.1.2.4 Faktor Kualitas Sumber Daya Manusia

Menurut pendapat dari (Dawam Raharjo, 1999) dalam bukunya berjudul *Intelektual, Inteligensia dan perilaku politik bangsa*, beliau mengatakan bahwa yang dimaksud kualitas sumberdaya manusia adalah kualitas sumberdaya manusia itu tidak hanya ditentukan oleh aspek keterampilan atau kekuatan tenaga fisiknya saja, akan tetapi juga pendidikan atau kadar pengetahuannya, pengalaman atau kematangannya dan sikapnya serta nilai-nilai yang dimilikinya. pendidikan atau kadar pengetahuannya, Dan beliau juga

mengatakan aspek biologi juga memiliki peran dan arti penting bagi peningkatan kualitas sumberdaya manusia.

Pendidikan

Pengurangan kemiskinan sama dengan pembangunan manusia. Karena aset utama penduduk miskin adalah tenaga kerja mereka, investasi dalam pendidikan dan kesehatan akan lebih bermanfaat bagi penduduk miskin daripada penduduk tidak miskin. Meningkatkan produktivitas dan pendapatan akan sangat diuntungkan jika ada fasilitas pendidikan dan kesehatan yang murah. Hampir tidak ada orang yang dapat menentang fakta bahwa pendidikan bertanggung jawab atas pembangunan masa depan. Jika dunia pendidikan tidak mendapat perhatian yang cukup, negara ini akan hancur dalam waktu dekat. Karena pendidikan mempertahankan jati diri manusia dan membangun karakter. Banyak orang miskin yang mengalami kebodohan atau bahkan mengalaminya secara sistematis (Wiguna, 2013). Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami bahwa kemiskinan dapat menyebabkan kebodohan dan kebodohan jelas sama dengan kemiskinan (Wijayanto, 2010). Hubungan antara pendidikan dan kemiskinan sangat signifikan karena semakin tinggi pendidikan seseorang, maka keahlian juga meningkat sehingga akan mendorong produktivitas kerja (Astrini, 2013).

Untuk mengatasi kebodohan dan ketertinggalan sosial ekonomi, pendidikan harus menjadi prioritas utama. Tujuan pendidikan adalah untuk membentuk individu yang berkualitas tinggi dan memiliki karakter yang memiliki visi yang luas untuk mencapai cita-cita yang diharapkan dan mampu beradaptasi

dengan baik dalam berbagai lingkungan. Oleh karena itu, salah satu tujuan pendidikan adalah untuk mendorong seseorang untuk menjadi lebih baik. Untuk tujuan memberikan informasi kepada bayi sebelum proses kelahiran, banyak orang memulai pendidikan bayi sejak masih dalam kandungan dengan memperdengarkan musik, membaca untuknya, atau berbicara dengannya.

Pekerjaan Alternatif

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan bahwa "pekerjaan alternatif" adalah pilihan di antara dua atau lebih kemungkinan. Dalam hal ini, variabel ini dimasukkan karena peneliti ingin mengetahui apakah nelayan di pesisir memiliki pekerjaan alternatif selain melaut untuk mendapatkan uang untuk hidup dan membiayai keluarga mereka.

2.1.2.5 Faktor Ekonomi

Kepemilikan Modal Usaha

Faktor modal sering kali mempengaruhi bisnis, yang dapat menyebabkan masalah lain seperti modal yang tidak cukup, yang memungkinkan seseorang untuk membuka bisnis dagangnya tetapi tidak dapat memaksimalkan usahanya. Modal adalah semua bentuk kekayaan yang dapat digunakan dalam proses produksi untuk meningkatkan output. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, modal usaha adalah uang yang digunakan sebagai pokok (induk) untuk berdagang, melepas uang, dan sebagainya; harta benda (uang, barang, dan sebagainya) yang dapat digunakan untuk menghasilkan sesuatu; dan modal adalah semua bentuk harta benda yang dapat digunakan untuk menghasilkan sesuatu yang menambah kekayaan.

Modal adalah kekayaan yang memiliki kemampuan untuk menghasilkan keuntungan di masa depan. Aset ini digunakan untuk membantu pembagian aset berikutnya. Berbicara tentang modal, banyak orang mengacu pada suntikan dana atau uang yang dapat membantu membangun atau mengembangkan sebuah bisnis. Modal yang digunakan dapat berasal dari modal sendiri; namun, jika modal sendiri tidak mencukupi, modal pinjaman dapat ditambahkan.

Dua komponen ekonomi, nelayan sebagai produsen hasil tangkapan dan tokeh sebagai pihak yang memasarkan hasil tangkapan nelayan, membentuk inti dari dinamika aktivitas ekonomi nelayan (Kusnadi, 2000). Dalam masyarakat nelayan di Kecamatan Berandan Barat, tokeh telah berkembang menjadi pranata ekonomi lokal yang melibatkan relasi sosial dan ekonomi. Nelayan membangun hubungan dengan tokeh sebagian besar karena ketidaksesuaian dalam struktur kepemilikan modal dan alat tangkap.

Dalam struktur paling dasar dari masyarakat nelayan, buruh nelayan biasanya tidak memiliki akses ke sumber daya produksi, juga dikenal sebagai alat tangkapan. Di sisi lain, bagi nelayan yang tidak memiliki akses ke sumber daya produksi, tenaga dan keahlian adalah satu-satunya hal yang dapat mereka jual kepada tokeh untuk bertahan hidup. Dengan kata lain, hubungan yang dibangun dan dijalankan dengan tokeh menunjukkan adaptasi fungsional nelayan untuk bertahan hidup.

2.1.2.6 Faktor Hubungan Kerja Nelayan

Karena manusia tidak dapat berdiri sendiri tanpa melakukan interaksi antara satu sama lain, manusia harus saling berhubungan dalam kehidupan sehari-hari. Tempat di mana hubungan didasarkan pada keakraban, pengakuan, dan

tindakan satu sama lain. sehingga terbentuk jalinan sosial, suatu hubungan vertikal dan horizontal.

Menurut (Kusnadi, 2000), jalinan sosial antar nelayan membentuk pola hubungan yang dapat diklasifikasikan baik secara horizontal maupun vertikal. Hubungan sesama kerabat, saudara sedarah, dan bentuk afinitas dikenal sebagai pola horizontal. Sementara pola vertikal terlihat dalam interaksi nelayan, yang membentuk pola hubungan patron-klien antara nelayan kaya dan tengkulak dengan nelayan miskin, pola ini menunjukkan bahwa orang akan lebih kuat berinteraksi jika antara satu dengan yang lain tidak ada kesenjangan sosial ekonomi yang signifikan.

Karena ada ketergantungan ekonomi antara buruh, juragan, dan tengkulak, pola vertikal muncul. Di antara kehidupan petani proletar, hubungan patron-klien sangat umum. Hubungan ini melibatkan seseorang dengan status sosial ekonomi lebih tinggi yang menggunakan kekuatan dan kekuatan mereka untuk melindungi dan menguntungkan seseorang dengan status sosial ekonomi lebih tinggi. Spesifik untuk nelayan konvensional. (Aldwin, 2009) menjelaskan bahwa patron adalah toke perahu atau toke ikan yang biasanya disebut nelayan kaya. Klien adalah nelayan tradisional yang tidak dapat melaut karena tidak dapat melaut, terutama saat laut pasang. Toke ikan atau toke perahu tetap menjamin kehidupan sehari-hari nelayan tradisional dan keluarganya selama masa menganggur. Pola bagi hasil ditentukan oleh pola hubungan kerja di antara unit alat tangkap.

Teknologi yang digunakan

Kemajuan Teknologi: Metode pekerjaan tradisional yang diperbarui dan baru diciptakan oleh teknologi. Ada tiga kategori kemajuan teknologi:

1. Kemajuan teknologi yang netral, di mana tingkat output lebih tinggi daripada kombinasi input dan tenaga kerja yang sama.
2. Kemajuan teknologi yang hemat tenaga kerja (hemat tenaga kerja) atau modal (hemat modal), di mana tingkat output yang lebih tinggi dapat dicapai dengan jumlah tenaga kerja atau modal yang sama.
3. Kemajuan teknologi dalam meningkatkan modal, di mana tingkat output yang lebih tinggi dapat dicapai dengan jumlah tenaga kerja atau modal yang sama.

Sebagian besar nelayan di Indonesia menggunakan teknologi penangkapan ikan yang paling umum, yaitu perahu yang digerakkan oleh motor tempel. Motorisasi perikanan ini biasanya ditemukan pada perahu yang berada di perairan pesisir yang berhadapan dengan laut bebas. Nelayan lokal biasa menggunakan kapal longboat, kolekole, atau sistem dayung, dan kapal motor dengan berbagai jenis alat tangkap seperti jarring, pancing, bagan, dan bambu.

2.1.3. Masyarakat Pesisir

1. Pengertian masyarakat pesisir

Arif Satria menyatakan bahwa "masyarakat pesisir adalah sekumpulan masyarakat yang hidup bersama-sama di wilayah pesisir dan membentuk dan memiliki kebudayaan yang khas yang terkait dengan ketergantungan pada pemanfaatan sumber daya pesisir." Nelayan, pembudidaya ikan, pengelola ikan, dan bahkan pedagang ikan adalah semua bagian dari masyarakat pesisir, yang bergantung pada sumber daya laut dan wilayah pesisir.

Sebagian besar masyarakat di kawasan pesisir adalah nelayan secara turun temurun. Masyarakat nelayan menekankan pentingnya masyarakat lokal yang mandiri sebagai sistem yang mengorganisir diri mereka sendiri. Hidup, tumbuh,

dan berkembang di wilayah pesisir, yang merupakan tempat transisi antara laut dan wilayah, disebut masyarakat pesisir.

Menurut Undang-Undang Perikanan No.45 Tahun 2009, nelayan terdiri dari tiga komponen utama: sumber daya manusia, unit perikanan, dan sumber daya ikan. Kehidupan nelayan Indonesia biasanya menjadi tengkulak sosial ekonomi, terutama dalam produksi, pemasaran, dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Orang-orang ini hanya memiliki tenaga kerja dan alat tangkap yang sederhana, pendidikan yang rendah, dan sedikit pengetahuan dan informasi.

Masyarakat pesisir Indonesia, terutama nelayan kecil dan nelayan buruh, memiliki ritme hidup dan tantangan yang berbeda. Selain kondisi alam yang sulit, masyarakat pesisir didominasi oleh masyarakat nelayan yang masih mengalami masalah ekonomi. Karena banyak desa pesisir yang terpencil, program pembangunan belum mencapai daerah-daerah tersebut.

Nelayan sangat tergantung pada musim, mereka mendapat sedikit keuntungan, dan mereka memiliki pendapatan bulanan yang rendah. Kelemahan struktural komunitas nelayan, kapasitas permodalan yang lemah, harga jual ikan yang tinggi, jeratan utang tengkulak, dan keterbatasan daya serap industri perikanan adalah semua masalah klasik yang menghinggapi komunitas nelayan.

2. Karakteristik masyarakat pesisir

Interaksi masyarakat dengan elemen sosial, ekonomi, dan lingkungan menentukan sifat dan karakteristik masyarakat pesisir. Ketergantungan musim adalah ciri khas komunitas nelayan, dan komunitas pesisir sangat bergantung pada lingkungan mereka dan rentang terhadap kerusakan lingkungan. Adat istiadat dan budaya lokal diwariskan dari masyarakat pesisir.

Salah satu aspek penting dari masyarakat pesisir adalah aktivitas perempuan dan anak-anak yang bekerja mencari nafkah, seperti bekerja sebagai pedagang ikan atau pengecer, untuk membantu ekonomi keluarga mereka di masyarakat pesisir. Pasangan dan anak-anak berusaha keras untuk membantu kepala keluarga mereka mencari nafkah dengan mengelolah dan menjual hasil laut seperti ikan dan karang di toko ikan, hal ini yang menjadi salah satu masalah mencari nafkah.

Menurut (Fachrudin, A. dalam Safari, 2006), kegiatan ekonomi masyarakat pesisir, yang lebih berorientasi pada alam dan sangat bergantung pada lingkungan, musim, dan pasar, membedakan mereka dari masyarakat lainnya. Ini membuat kehidupan mereka tidak stabil.

Karena mereka bergantung pada hasil laut sebagai sumber daya alam, ciri-ciri masyarakat pesisir termasuk nelayan. Menurut Imron, nelayan adalah sekelompok orang yang secara langsung bergantung pada hasil laut, baik dari hasil tangkapan maupun budi daya. Mereka biasanya tinggal di pinggir pantai, di kawasan pemukiman dekat tempat kerja mereka.

Sekelompok orang yang tinggal atau bermukim di wilayah pesisir atau sepanjang garis pantai memiliki kepribadian dan karakteristik yang berbeda-beda. Mereka hidup dalam struktur sosial yang bergantung pada sumber daya laut dan pesisir dan mempertahankan kebiasaan budaya tertentu. Masyarakat pesisir, sebagai bagian dari masyarakat laut, memiliki semua karakteristik, norma, dan nilai yang sama dengan masyarakat laut. pandangannya tentang masa depan dalam menghadapi berbagai situasi sosial baru, termasuk tantangan dan masalah hidup di berbagai bidang seperti ekonomi, politik, pendidikan dan kesehatan.

Menurut (Koentjaraningrat, 1990), masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul atau dengan istilah lain saling berinteraksi. Kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinu dan terikat oleh suatu rasa identitas bersama.

Menurut (Soekanto, 2003), masyarakat atau komunitas adalah merujuk pada bagian masyarakat yang bertempat tinggal di suatu wilayah (dalam arti geografi) dengan batas-batas tertentu . dimana yang menjadi dasarnya adalah interaksi yang lebih besar dari anggota-anggotanya, dibandingkan dari penduduk.

Dari Berbagai pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- Interaksi sesama anggota masyarakat
- Menempati wilayah dengan batas-batas tertentu
- Saling tergantung satu dengan yang lainnya
- Memiliki adat istiadat tertentu/kebudayaan
- Memiliki identitas bersama.

2.1.3.1 Kondisi Masyarakat Pesisir

Masyarakat yang hidup di pesisir dan bergantung pada sumber daya laut dikenal sebagai masyarakat maritim. Dalam situasi ini, teori kondisi masyarakat maritim memberikan penjelasan tentang bagaimana berbagai komponen sosial, ekonomi, dan lingkungan berinteraksi satu sama lain dan mempengaruhi kehidupan masyarakat. Kondisi di Desa Perlis Berandan Barat, Langkat, sangat penting untuk dipelajari karena masyarakat sangat bergantung pada hasil laut. Akses terhadap sumber daya laut adalah komponen penting dari kondisi masyarakat maritim. Akses ini mencakup tidak hanya kemampuan untuk

menangkap ikan, tetapi juga akses ke pasar, pelabuhan, dan fasilitas pengolahan yang mendukung kegiatan perikanan. Keterbatasan akses ini sering kali menjadi penyebab utama kemiskinan nelayan.

Menurut teori modal sosial, hubungan antar individu dan jaringan sosial dapat memengaruhi kesejahteraan ekonomi. Solidaritas antar nelayan di Desa Perlis dapat membantu mereka berbagi informasi, sumber daya, dan dukungan. Namun, masyarakat akan kesulitan untuk saling membantu dalam menghadapi kesulitan ekonomi jika jaringan sosial ini lemah. Fluktuasi harga hasil laut sering memengaruhi kondisi ekonomi masyarakat maritim. Ketidakstabilan harga ikan dan produk laut lainnya dapat menyebabkan pendapatan nelayan tidak menentu. Tingkat kemiskinan yang tinggi di masyarakat biasanya disebabkan oleh pendapatan yang rendah dan tidak stabil ini. Selain itu, kerusakan lingkungan dan perubahan iklim memengaruhi masyarakat maritim. Pencemaran laut, perubahan suhu air, dan penangkapan ikan yang berlebihan dapat membahayakan mata pencaharian nelayan dan mengurangi populasi ikan. Keterbatasan akses terhadap teknologi dan informasi juga menjadi tantangan bagi masyarakat maritim. Banyak nelayan di Desa Perlis yang masih menggunakan metode tradisional dalam penangkapan ikan, yang mengakibatkan rendahnya produktivitas. Penerapan teknologi yang lebih modern dan pelatihan bagi nelayan dapat membantu meningkatkan hasil tangkapan dan pendapatan mereka.

Kondisi kesejahteraan sosial yang memburuk dikalangan nelayan sangat dirasakan di desa- desa pesisir yang perairannya mengalami *overfishing* (tangkap lebih) sehingga hasil tangkap atau pendapatan yang diperoleh nelayan bersifat fluktuatif, tidak pasti, dan semakin menurun dari waktu ke waktu. Dalam situasi

demikian, rumah tangga nelayan akan senantiasa berhadapan dengan tiga persoalan yang sangat krusial dalam kehidupan mereka, yaitu :

- a. Pergulatan untuk emenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- b. Tersendat-sendatnya pemenuhan kebutuhan pendidikan anak-anaknya.
- c. Terbatasnya akses mereka terhadap jaminan kesehatan.

Ketiga akses diatas merupakan kebutuhan hidup yang paling mendasar dalam rumah tangga nelayan, yang sering tidak terpenuhi secara optimal. Ketiadaan atau kekurangan kemampuan kreatif masyarakat nelayan untuk mengatasi sosial ekonomi di daerahnya kan mendorong mereka masuk perangkat keterbelakangan yang berkepanjangan sehingga dapat mengganggu pencapaian tujuan kebijakan pembangunan dibidang kelautan dan perikanan.

2.1.4. Nelayan

Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan. Pengertian mata pencaharian adalah sumber nafkah utama dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan menangkap ikan. Sedangkan nelayan menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan. Dalam UU Nomor 31 Tahun 2004, nelayan dan nelayan kecil mempunyai defenisi yang berbeda yaitu nelayan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Jadi pembuat Undang-Undang membedakan berdasarkan besar kecilnya skala penangkapan tetapi dalam penengakan hukum hanya mengenal istilah nelayan, tidak membedakan nelayan kecil atau besar.

Nelayan dibagi menjadi 4 (empat) tingkatan yang dilihat dari kapasitas teknologi

orientas pasar dan karakteristik hubungan produksi, ke empat tingkatan nelayan tersebut adalah :

1. Pemenuhan kebutuhan sendiri (subsitem). Umumnya nelayan golongan ini masih menggunakan alat tangkap tradisional, seperti dayung atau sampan tidak bermotor dan masih melibatkan anggota keluarga sebagai tenaga kerja utama.
2. *Post-peasant fisher* dicirikan dengan penggunaan teknologi penangkapan ikan yang lebih mau seperti motor tempat atau kapal motor. Penguasaan sarana perahu motor tersebut semakin membuka peluang bagi nelayan untuk menangkap ikan di wilayah perairan yang lebih jauh dan surplus daya tangkapannya lebih besar. Umumnya nelayan ini beroperasi di daerah pesisir. Pada jenis ini nelayan sudah berorientasi pasar. Sementara itu, tenaga kerja yang digunakan sudah meluas dan tidak bergantung pada anggota keluarga saja
3. *Commercial Fisher*, yaitu nelayan yang telah berorientasi pada peningkatan keuntungan. Skala usahanya sudah besar yang dicirikan dengan banyaknya jumlah tenaga kerja dari status yang berbeda dari buruh hingga manajer. Teknologi yang digunakan lebih modern dan membutuhkan keahlian sendiri dalam pengoperasian kapal maupun tangkapannya.
4. *Industrial Fisher*, ciri nelayan jenis ini adalah diorganisasi dengan cara-cara yang mirip dengan perusahaan agroindustri di negara-negara maju, secara relatif lebih padat modal, memberikan pendapatan yang lebih tinggi dari pada perikanan sederhana, baik untuk pemilik maupun awak perahu,

dan menghasilkan untuk ikan kaleng dan ikan beku yang berorientasi ekspor.

2.2. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	(Sani et al., 2022)	Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nelayan tangkap di desa Galesong kota Kecamatan Takalar Kabupaten Takalar	Hasilnya menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nelayan tangkap di desa Galesong Kota Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar secara signifikan adalah lama melaut serta ukuran mesin yang digunakan. Sedangkan faktor-faktor yang tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan nelayan tangkap di desa Galesong Kota Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar adalah umur, pendidikan terakhir, jumlah tanggungan keluarga, dan pengalaman melaut
2	(Setyadi & Indriyani, 2021)	Tingkat kemiskinan masyarakat pesisir(studi kasus di dusun 1 Desa Sidodadi Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pasurawan)	Hasilnya menunjukkan bahwa rumah tangga yang tergolong miskin sebanyak 32 KK (45%) dan rumah tangga yang tergolong tidak miskin sebanyak 39 Kakak (55%) dan karakteristik jumlah rumah tangga yang berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan adalah pendidikan, pendapatan jumlah anggota keluarga yang bekerja dan fasilitas
3	Ferry J. Julianto(2016)	Fenomena Kemiskinan Nelayan	Hasilnya menunjukkan bahwa Pengabaian fungsi pemerintah mendukung proses perubahan yang berlangsung. Oleh karena itu, nelayan tidak mendapat manfaat dari perubahan yang terjadi pada struktur dominasi. Namun, masih dalam kategori kemiskinan. Dengan kata lain, beberapa orang menentang gagasan Giddens bahwa struktur itu selalu bersifat memberdayakan atau enabling. Sebaliknya, telah ditemukan bahwa struktur juga dapat menjadi penghalang atau tidak dapat diubah, sehingga perubahan struktural yang terjadi bukan

			memberdayakan, tetapi hanya mereplikasi dan mempertahankan kemiskinan kaum nelayan.
4.	Putri el al (2020)	Analisis Gender dan kemiskinan di komunitas nelayan)	Hasinya menunjukkan bahwa perempuan sangat penting dalam rumah tangga nelayan sebagai pendukung ekonomi dan pengelola rumah tangga. Ada perbedaan gender yang signifikan dalam akses ke pendidikan dan pelatihan
5.	Isdaini (2022)	Pengentasan Kemiskinan masyarakat nelayan di Desa Kembangragi Kecamatan Pasimasunggu Kepulauan Selayar	Hasilnya menaunjukkan bahwa Masyarakat nelayan di Desa Kembangragi Kecamatan Pasimasunggu miskin karena berbagai alasan, salah satunya adalah kondisi alam. Saat cuaca buruk, nelayan kecil memilih untuk tidak melaut karena beresiko tinggi dan keuntungan yang mereka peroleh tidak sebanding dengan modal yang mereka keluarkan. Karena nelayan hanya menggunakan alat tangkap tradisional dan tidak memiliki keterampilan yang diperlukan, usaha perikanan menjadi sulit untuk dijalankan. Selain itu, wilayah penangkapan terbatas karena sebagian besar nelayan masih menggunakan sistem perahu dayung dan sampan-sampan kecil, sehingga wilayah penangkapan hanya terbatas di pulau-pulau kecil yang berdekatan, dan kurangnya tingkat pendidikan.
6	Kamaluddin (2023)	Kebijakan pembangunan dalam pengentasan kemiskinan di wilayah pesisir Kabupaten Bima	Hasilnya menunjukkan bahwa pengentasan kemiskinan tidak dapat dicapai hanya dengan menggunakan metode satu solusi. Selain itu, kemiskinan yang dialami oleh penduduk pesisir Kabupaten Bima memiliki kehidupan yang rumit karena faktor struktural, kultural, dan alam. Dalam kasus masyarakat pesisir di Kabupaten Bima, ketiga pendekatan yang digunakan didasarkan pada penyebab

			kemiskinan. Mereka dibingkai dalam strategi yang melibatkan pemerintah, lembaga terkait, dan masyarakat setempat untuk memastikan bahwa masyarakat tidak hanya dapat berdaya namun juga program yang dilaksanakan dapat terus berlanjut.
7	Fadhillah Insani (2024)	Analisis Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir di Desa Perlis Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat	Hasil penelitian yang dilakukan untuk menjelaskan pemberdayaan masyarakat wilayah pesisir di Desa Perlis, Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat menunjukkan bahwa pendekatan pemberdayaan masyarakat telah memenuhi aspek memungkinkan, mendorong, dan melindungi. Dengan kata lain, pemberdayaan masyarakat wilayah pesisir, khususnya masyarakat Desa Perlis, Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat, telah memenuhi aspek-aspek tersebut.

2.3. Kerangka Konsptual

Faktor yang menyebabkan kemiskinan di masyarakat pesisir Desa Perlis adalah penggunaan sarana produksi yang masih sederhana, yang menyebabkan jumlah hasil produksi yang diperoleh masih sangat rendah dibandingkan dengan orang yang memiliki sarana yang cukup. Selain itu, masyarakat di pesisir Desa Perlis terus dililit oleh lingkaran kemiskinan struktural karena tingkat pendidikan yang rendah, kurangnya pekerjaan alternatif, kurangnya kepemilikan modal usaha, dan keterbatasan teknologi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual yang didasarkan pada indikator kemiskinan yang telah ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kondisi kemiskinan masyarakat maritim di Desa Perlis, Langkat. Indikator-indikator yang digunakan dalam penelitian ini mencakup tiga kategori

utama, yaitu indikator ekonomi, indikator sosial, dan indikator lingkungan serta geografis.

1. Indikator Ekonomi: Dalam kategori ini, terdapat beberapa aspek penting yang akan dianalisis, antara lain pendapatan per kapita, tingkat konsumsi, dan kepemilikan aset produktif. Pendapatan per kapita merupakan ukuran yang menunjukkan rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap individu dalam masyarakat. Tingkat konsumsi mencerminkan pola pengeluaran masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, yang dapat memberikan gambaran tentang kesejahteraan ekonomi mereka. Selain itu, kepemilikan aset produktif, seperti lahan pertanian, alat tangkap ikan, dan peralatan pertanian, juga menjadi indikator penting yang menunjukkan kemampuan masyarakat untuk menghasilkan pendapatan dan meningkatkan taraf hidup mereka.

2. Indikator Sosial: Kategori ini mencakup aspek-aspek yang berkaitan dengan kualitas hidup masyarakat, seperti tingkat pendidikan, kondisi kesehatan, dan akses terhadap layanan dasar. Tingkat pendidikan merupakan faktor kunci yang mempengaruhi kemampuan individu untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan meningkatkan keterampilan. Kondisi kesehatan masyarakat, yang mencakup prevalensi penyakit dan akses terhadap layanan kesehatan, juga sangat penting, karena kesehatan yang baik berkontribusi pada produktivitas dan kualitas hidup. Akses terhadap layanan dasar, seperti air bersih, sanitasi, dan pendidikan, menjadi indikator penting dalam menilai kesejahteraan sosial masyarakat.

3. Indikator Lingkungan dan Geografis: Dalam kategori ini, fokus utama adalah pada ketersediaan infrastruktur dan akses ke sumber daya alam. Ketersediaan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, dan fasilitas transportasi,

sangat berpengaruh terhadap mobilitas masyarakat dan akses mereka terhadap pasar serta layanan publik. Akses ke sumber daya alam, termasuk lahan pertanian, perairan, dan hutan, juga menjadi faktor penting yang menentukan kemampuan masyarakat untuk mengembangkan usaha pertanian dan perikanan. Lingkungan yang mendukung, dengan sumber daya alam yang melimpah dan infrastruktur yang memadai, dapat meningkatkan peluang masyarakat untuk keluar dari kemiskinan.

Dengan menggunakan indikator-indikator tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam berbagai faktor yang mempengaruhi kemiskinan masyarakat maritim di Desa Perlis. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai tantangan yang dihadapi oleh masyarakat serta strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan pangan di desa tersebut.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Adapun penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan induktif juga digunakan. Jadi, dapat dikatakan bahwa penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif menggambarkan masalah khusus berdasarkan fakta yang ada. Fakta-fakta ini kemudian dipelajari untuk memecahkan masalah dan sampai pada kesimpulan umum.

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan fenomena sosial melalui pengamatan tertentu yang ditentukan secara sistematis, faktual, akurat, dan kongkrit. Penelitian kualitatif dan deskriptif lebih menekankan pada keaslian, bukan berdasarkan teori, tetapi berdasarkan fakta di lapangan atau, dengan kata lain, menggunakan istilah lain yang menekankan pada fenomena nyata yang terjadi di tempat atau komunitas tertentu.

Menurut (Moleong, 2006) penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menggunakan wawancara terbuka untuk mempelajari dan memahami sikap, pandangan, perasaan, dan perilaku seseorang atau sekelompok orang. Di sisi lain, (Nawawi, 1992) menggambarkan model penelitian deskriptif sebagai proses pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subyek dan obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) berdasarkan fakta-fakta yang jelas. Peneliti memilih menggunakan metode kualitatif karena mereka ingin menjadi bagian dari proses penelitian, dan metode kualitatif cocok untuk mengeksplorasi rumusan masalah penelitian.

3.2. Defenisi Operasional variabel

Definisi operasional adalah penjelasan yang jelas dan spesifik tentang bagaimana suatu ide atau variabel dalam penelitian diukur atau diidentifikasi. Ini juga digunakan sebagai acuan untuk melakukan penelitian di mana antar variabel dapat dihubungkan dan disesuaikan dengan data yang diinginkan. Variabel-variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

Variabel	Definisi Operasional	Kategori	Sumber Data
Kemiskinan rumah tangga	Kondisi di mana rumah tangga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan papan, diukur melalui embang konsumsi dan pendapatan.	Variabel Depeden	Badan Pusat Statistik (BPS). (2021). Pengukuran kemiskinan di Indonesia. https://www.bps.go.id
Pendidikan	Tingkat pencapaian embanguna formal yang dimiliki individu dalam rumah tangga, diukur dari jenjang embanguna terakhir yang diselesaikan.	Variabel Independen	Bank Dunia. (2018). Laporan pengembangan dunia 2018: Belajar untuk mewujudkan janji pendidikan. https://www.worldbank.org
Pekerjaan Alternatif	Jenis pekerjaan yang dilakukan oleh anggota rumah tangga di luar pekerjaan utama, yang dapat memberikan tambahan pendapatan, diukur dari jenis dan frekuensi pekerjaan tersebut.	Variabel Independen	Organisasi Perburuhan Internasional (ILO). (2017). Tinjauan embang ketenagakerjaan dunia 2017: Perusahaan dan pekerjaan yang berkelanjutan. https://www.ilo.org
Kepemilikan Modal Usaha	Aset yang dimiliki oleh rumah tangga yang digunakan untuk menjalankan usaha, diukur dari nilai dan jenis modal yang tersedia.	Variabel Independen	Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP). (2016). Laporan embangunan manusia 2016: Pembangunan manusia untuk semua.

			http://hdr.undp.org
Kepemilikan Teknologi	Akses dan penggunaan teknologi yang dimiliki oleh rumah tangga, diukur dari jenis teknologi yang digunakan dalam kegiatan sehari-hari atau usaha.	Variabel Independen	Uni Telekomunikasi Internasional (ITU). (2020). Mengukur perkembangan digital: Fakta dan angka 2020. https://www.itu.int

3.3. Tempat dan Waktu Penelitian

3.3.1. Tempat Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Perlis yang merupakan sebuah desa yang berada di Kecamatan Berandan Barat Kota Pangkalan Berandan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara. Luas wilayah Desa Perlis adalah sebesar 611 Ha, berjarak kurang lebih 10 Km dari Stabat Ibu Kota Kecamatan dan 93 Km dari Medan.

3.3.2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian direncanakan berlangsung sejak tanggal keluarnya izin penelitian. Waktu penelitian dilakukan terhitung mulai Desember s.d maret.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Observasi

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah observasi. Peneliti melakukan pengamatan secara langsung terhadap kondisi kemiskinan yang dialami oleh masyarakat maritim di Desa Perlis, Kecamatan Berandan Barat, Kabupaten Langkat. Melalui observasi ini, peneliti dapat memperoleh informasi yang akurat dan mendalam mengenai berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan mereka. Observasi langsung memungkinkan

peneliti untuk melihat secara nyata situasi sosial, ekonomi, dan lingkungan yang dihadapi oleh masyarakat maritim, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi kemiskinan yang ada. Dengan demikian, hasil observasi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam analisis kemiskinan masyarakat maritim di Desa Perlis, serta menjadi dasar untuk rekomendasi kebijakan yang lebih tepat sasaran dalam upaya pengentasan kemiskinan di daerah tersebut.

3.5 Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis data, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data yang diperoleh dari observasi langsung akan dianalisis dengan cara menyusun deskripsi mendetail mengenai kondisi kemiskinan masyarakat maritim, termasuk aspek – aspek seperti akses terhadap sumber daya alam, pendidikan, kesehatan dan pekerjaan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Desa Perlis Kecamatan Berandan Barat

Desa Perlis terletak di Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, dan merupakan salah satu desa maritim yang berbatasan langsung dengan Laut Sumatera. Dengan topografi yang didominasi oleh dataran rendah dan keberadaan hutan mangrove, desa ini memiliki potensi sumber daya laut yang melimpah. Penduduk Desa Perlis, yang berjumlah sekitar 5.446 jiwa, sebagian besar berprofesi sebagai nelayan, petani, dan pekerja di sektor informal. Meskipun mayoritas penduduk berada dalam kelompok usia produktif, tingkat pendidikan yang rendah menjadi salah satu faktor yang berkontribusi terhadap kemiskinan di desa ini.

Desa Perlis berada di pesisir timur Provinsi Sumatera Utara yang berbatasan dengan laut dan tepi kawasan hutan yang termasuk ke dalam bagian Kecamatan Berandan Barat, Kabupaten Langkat. Luas Wilayah Desa Perlis adalah sebesar 611 Ha, berjarak kurang lebih 10 Km dari Stabat Ibu Kota Kecamatan dan 93 Km dari Medan. Penduduk Desa Perlis berjumlah 5.446 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 2.760 jiwa, perempuan 2.686 jiwa, penduduk dengan status sebagai kepala keluarga sebanyak 2.295 jiwa, yang terbagi di dalam 9 dusun.



Gambar 4.1 Kondisi Desa Perlis

Berdasarkan letak dan posisinya yang menempati kawasan pesisir, desa Perlis dikenal sebagai perkampungan nelayan yang mayoritas penduduknya bergantung pada hasil tangkapan ikan sebagai sumber utama penghidupan. Meski begitu, terdapat sejumlah warga yang menjalankan usaha dagang, guru, buruh, PNS dan petani. Berdasarkan hasil wawancara dengan aparat desa setempat, didapatkan temuan bahwa pendapatan rata-rata masyarakat sebesar Rp. 1.000.000 yang berada di bawah standar pendapatan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), rata-rata pendidikan akhir SMA dan dengan jumlah angkatan kerja 2.574 jiwa (Sumber : Arsip Desa).

Ekonomi Desa Perlis sangat bergantung pada sektor perikanan, di mana masyarakat setempat mengandalkan hasil tangkapan laut seperti ikan, udang, dan kerang sebagai sumber pendapatan utama. Namun, nelayan di desa ini menghadapi berbagai tantangan, termasuk penangkapan ikan yang tidak berkelanjutan, perubahan iklim, dan keterbatasan akses terhadap teknologi modern. Selain sektor perikanan, pertanian juga menjadi sumber pendapatan, meskipun kontribusinya tidak sekuat sektor perikanan. Keterbatasan infrastruktur,

seperti jalan akses yang sering kali dalam kondisi buruk dan fasilitas umum yang belum memadai, turut mempengaruhi mobilitas masyarakat dan akses terhadap layanan dasar, sehingga berkontribusi pada kondisi kemiskinan.

Masalah sosial di Desa Perlis juga cukup kompleks, dengan tingkat pengangguran yang tinggi, terutama di kalangan pemuda. Akses terhadap pendidikan yang berkualitas dan layanan kesehatan yang memadai masih menjadi tantangan, yang mengakibatkan rendahnya kualitas hidup masyarakat. Banyak keluarga terjebak dalam siklus kemiskinan, di mana anak-anak mereka tidak mendapatkan pendidikan yang memadai, sehingga sulit untuk keluar dari kondisi tersebut. Meskipun beberapa upaya pemberdayaan masyarakat telah dilakukan oleh pemerintah dan organisasi non-pemerintah, seperti program pelatihan keterampilan dan bantuan modal usaha, tantangan dalam implementasi program-program ini sering kali muncul, termasuk kurangnya partisipasi masyarakat dan dukungan dari pihak terkait.

Secara keseluruhan, Desa Perlis, dengan potensi maritim yang dimilikinya, masih menghadapi tantangan besar dalam mengatasi kemiskinan. Keterbatasan infrastruktur, rendahnya tingkat pendidikan, dan ketergantungan pada sektor perikanan menjadi faktor-faktor yang memperburuk kondisi ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang komprehensif dan berkelanjutan untuk memberdayakan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan mereka.

4.2. Hasil Observasi Lapangan

4.2.1. Kondisi Ekonomi Masyarakat Maritim

Berdasarkan hasil observasi, sebagian besar masyarakat Desa Perlis menggantungkan hidupnya pada sektor perikanan tangkap dengan peralatan yang

masih tradisional. Kehidupan sehari-hari mereka sangat dipengaruhi oleh kondisi laut dan cuaca, yang menjadi faktor utama dalam menentukan hasil tangkapan. Penghasilan nelayan di desa ini sangat bervariasi, tergantung pada musim dan hasil tangkapan yang diperoleh. Pada musim tertentu, ketika ikan melimpah, nelayan dapat meraih pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun, pada bulan-bulan tertentu, terutama saat cuaca buruk atau musim angin, banyak nelayan mengalami kesulitan ekonomi yang signifikan karena hasil tangkapan menurun drastis.

Kondisi ini menciptakan ketidakpastian dalam pendapatan mereka, yang sering kali tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga. Selain itu, ketergantungan pada tengkulak untuk menjual hasil tangkapan menjadi masalah yang semakin memperburuk situasi ekonomi nelayan. Tengkulak, yang biasanya memiliki akses lebih baik ke pasar, sering kali menentukan harga ikan tanpa mempertimbangkan biaya yang dikeluarkan oleh nelayan. Hal ini mengakibatkan nelayan menerima harga yang jauh lebih rendah dari nilai pasar yang seharusnya, sehingga keuntungan yang mereka peroleh menjadi sangat minim. Dalam banyak kasus, nelayan terpaksa menjual hasil tangkapan mereka dengan harga yang tidak menguntungkan hanya untuk segera mendapatkan uang tunai, yang membuat mereka terjebak dalam siklus kemiskinan.

Dalam menghadapi tantangan ini, beberapa nelayan di Desa Perlis mulai berusaha untuk beralih ke metode penangkapan yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan, serta mencari alternatif sumber pendapatan lain, seperti budidaya ikan atau usaha kecil lainnya. Namun, upaya ini sering kali terhambat oleh keterbatasan modal dan pengetahuan. Oleh karena itu, diperlukan dukungan

dari pemerintah dan lembaga terkait untuk memberikan pelatihan, akses ke teknologi yang lebih baik, serta menciptakan sistem pemasaran yang lebih adil bagi nelayan. Dengan demikian, diharapkan masyarakat Desa Perlis dapat meningkatkan kesejahteraan mereka dan mengurangi ketergantungan pada sistem tengkulak yang merugikan.

4.2.2. Kondisi Sosial Masyarakat

Dari observasi yang dilakukan, ditemukan bahwa tingkat pendidikan masyarakat Desa Perlis masih tergolong rendah. Banyak anak-anak di desa ini tidak menyelesaikan pendidikan dasar mereka, karena lebih memilih untuk membantu orang tua dalam bekerja di sektor perikanan. Keterlibatan anak-anak dalam aktivitas perikanan ini sering kali dianggap sebagai kontribusi penting bagi perekonomian keluarga, meskipun hal ini mengorbankan kesempatan mereka untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Akibatnya, rendahnya tingkat pendidikan ini berpengaruh pada minimnya keterampilan alternatif yang dapat dimiliki oleh masyarakat selain menjadi nelayan. Tanpa pendidikan yang memadai, generasi muda di Desa Perlis berisiko terjebak dalam siklus kemiskinan, di mana mereka tidak memiliki akses ke peluang kerja yang lebih baik di masa depan.

Kondisi ini menciptakan tantangan yang lebih besar bagi masyarakat, karena mereka tidak hanya kehilangan kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup, tetapi juga berpotensi mengulangi pola yang sama pada generasi berikutnya. Dengan keterampilan yang terbatas, masyarakat Desa Perlis menjadi sangat bergantung pada sektor perikanan, yang rentan terhadap fluktuasi cuaca dan perubahan lingkungan. Hal ini semakin memperburuk kondisi ekonomi

mereka, karena ketika hasil tangkapan menurun, mereka tidak memiliki keterampilan lain untuk mencari nafkah.

Kesehatan masyarakat juga menjadi perhatian utama di Desa Perlis. Fasilitas kesehatan yang tersedia di desa masih sangat terbatas, dengan jumlah tenaga medis yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Puskesmas yang ada sering kali kekurangan obat-obatan dan peralatan medis yang diperlukan, sehingga masyarakat kesulitan mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai. Kondisi ini menjadi semakin kritis bagi nelayan yang sering mengalami kecelakaan kerja di laut, seperti luka akibat peralatan penangkapan ikan atau masalah kesehatan akibat paparan cuaca ekstrem. Ketidakmampuan untuk mendapatkan perawatan yang tepat waktu dapat berakibat fatal, tidak hanya bagi individu yang mengalami kecelakaan, tetapi juga bagi keluarga mereka yang bergantung pada pendapatan dari pekerjaan tersebut.

Keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas juga menciptakan rasa ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Banyak dari mereka yang terpaksa pergi ke fasilitas kesehatan yang lebih jauh, yang memerlukan waktu dan biaya transportasi yang tidak sedikit. Dalam situasi darurat, keterlambatan dalam mendapatkan perawatan medis dapat berakibat serius, dan sering kali masyarakat harus mengandalkan pengobatan tradisional yang tidak selalu efektif. Oleh karena itu, peningkatan fasilitas kesehatan dan penyediaan tenaga medis yang memadai sangat diperlukan untuk memastikan bahwa masyarakat Desa Perlis dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang layak dan tepat waktu, sehingga mereka dapat menjalani kehidupan yang lebih sehat dan produktif.

4.2.3. Kondisi Infastruktur dan Aksesibilitas

Observasi saya menunjukkan bahwa akses jalan menuju Desa Perlis masih kurang baik, terutama ketika musim hujan, di mana jalanan menjadi sulit dilalui dan sering kali terendam air. Keterbatasan infrastruktur ini tidak hanya menyulitkan mobilitas masyarakat, tetapi juga menghambat distribusi hasil tangkapan nelayan ke pasar yang lebih luas. Akibatnya, banyak nelayan yang terpaksa menjual ikan mereka kepada tengkulak dengan harga yang lebih rendah, karena mereka tidak memiliki alternatif lain untuk memasarkan hasil tangkapan mereka. Ketergantungan pada tengkulak ini semakin memperburuk kondisi ekonomi nelayan, yang sering kali merasa dirugikan oleh harga yang ditetapkan tanpa mempertimbangkan biaya dan usaha yang telah mereka keluarkan.

Selain itu, akses terhadap listrik dan air bersih masih menjadi masalah utama di desa ini. Banyak rumah tangga yang belum terhubung dengan jaringan listrik, sehingga mereka mengandalkan penerangan dari lampu minyak atau generator yang biayanya cukup tinggi. Keterbatasan akses listrik ini berdampak pada kualitas hidup masyarakat, karena mereka tidak dapat memanfaatkan peralatan modern yang dapat meningkatkan produktivitas dan kenyamanan. Di sisi lain, masalah air bersih juga sangat krusial, di mana sebagian besar penduduk masih mengandalkan sumber air yang tidak terjamin kebersihannya, seperti sumur atau air hujan. Hal ini meningkatkan risiko kesehatan, terutama di kalangan anak-anak, yang lebih rentan terhadap penyakit yang ditularkan melalui air yang tercemar.

Kondisi infrastruktur yang buruk ini menciptakan tantangan yang lebih besar bagi masyarakat Desa Perlis, yang berusaha untuk meningkatkan

kesejahteraan mereka. Tanpa adanya perbaikan infrastruktur yang signifikan, seperti jalan yang layak, akses listrik yang memadai, dan penyediaan air bersih, masyarakat akan terus terjebak dalam siklus kemiskinan dan kesulitan. Oleh karena itu, diperlukan perhatian dan dukungan dari pemerintah serta pihak terkait untuk melakukan investasi dalam pembangunan infrastruktur yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di desa ini.

4.3. Pembahasan

Berdasarkan hasil observasi peneliti di lapangan langsung, dapat disimpulkan bahwa kemiskinan yang dialami oleh masyarakat maritim di Desa Perlis tidak hanya dipengaruhi oleh fakto ekonomi, tetapi juga dipengaruhi oleh aspek sosial dan infastruktur yang ada di Desa Perlis.

Faktor Ekonomi

1. Ketergantungan pada Sektor Perikanan

- Masyarakat Desa Perlis sangat bergantung pada sektor perikanan sebagai sumber utama pendapatan.
- Penggunaan teknologi penangkapan yang masih tradisional mengakibatkan hasil tangkapan yang rendah dan tidak efisien.
- Musim tertentu, seperti musim angin atau cuaca buruk, menyebabkan penurunan hasil tangkapan yang drastis, sehingga pendapatan nelayan menjadi tidak stabil.

2. Pengaruh Tengkulak

- Harga jual ikan yang ditentukan oleh tengkulak sering kali tidak mencerminkan nilai pasar yang seharusnya, sehingga nelayan menerima imbalan yang jauh lebih rendah.
- Ketergantungan pada tengkulak membuat nelayan kehilangan kontrol atas hasil kerja keras mereka, yang berkontribusi pada ketidakadilan ekonomi.
- Banyak nelayan terpaksa menjual hasil tangkapan mereka dengan harga murah untuk segera mendapatkan uang tunai, meskipun itu merugikan mereka dalam jangka panjang.

3. Minimnya Peluang Usaha Alternatif

- Keterbatasan dalam diversifikasi usaha membuat masyarakat sulit untuk mencari sumber pendapatan lain di luar sektor perikanan.
- Kurangnya pelatihan dan akses terhadap modal untuk memulai usaha baru menghambat kreativitas dan inovasi di kalangan masyarakat.
- Banyak keluarga terjebak dalam siklus kemiskinan karena tidak memiliki keterampilan yang dapat digunakan untuk pekerjaan lain.

Faktor Sosial

1. Rendahnya Tingkat Pendidikan

- Tingkat pendidikan yang rendah di kalangan masyarakat mengakibatkan kurangnya pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik.
- Banyak anak-anak yang tidak menyelesaikan pendidikan dasar karena harus membantu orang tua, sehingga mereka kehilangan kesempatan untuk mengembangkan potensi diri.

- Pendidikan yang tidak memadai juga mengakibatkan rendahnya kesadaran akan pentingnya kesehatan dan kesejahteraan.

2. Kualitas Hidup yang Rendah

- Kurangnya fasilitas kesehatan yang memadai berdampak pada kesehatan masyarakat, di mana mereka kesulitan untuk mendapatkan perawatan yang diperlukan.
- Tingginya angka kecelakaan kerja di kalangan nelayan, tanpa adanya akses cepat pelayanan kesehatan, dapat berakibat fatal.
- Kesehatan yang buruk berkontribusi pada produktivitas yang rendah, menciptakan siklus kemiskinan yang sulit diputus.

3. Keterbatasan Akses Informasi

- Masyarakat sering kali tidak memiliki akses yang memadai terhadap informasi mengenai peluang kerja, pelatihan, dan program bantuan yang tersedia.
- Kurangnya pengetahuan tentang hak-hak mereka sebagai pekerja juga membuat mereka rentan terhadap eksploitasi.
- Pendidikan dan penyuluhan yang minim mengenai manajemen keuangan dan perencanaan usaha juga menjadi kendala.

Faktor Infrastruktur

1. Kondisi Jalan yang Buruk

- Akses jalan yang sulit dilalui, terutama saat musim hujan, menghambat distribusi hasil perikanan dan akses ke pasar yang lebih luas.
- Keterbatasan infrastruktur transportasi membuat biaya distribusi menjadi tinggi, yang pada gilirannya mempengaruhi harga jual ikan.

- Masyarakat kesulitan untuk mengakses barang dan jasa yang diperlukan, seperti bahan makanan dan kebutuhan sehari-hari.

2. Keterbatasan Akses Listrik

- Banyak rumah tangga di Desa Perlis yang belum terhubung dengan jaringan listrik, sehingga mereka mengandalkan sumber energi alternatif yang lebih mahal dan kurang efisien.
- Keterbatasan akses listrik menghambat penggunaan peralatan modern yang dapat meningkatkan produktivitas, seperti pendingin untuk menjaga kesegaran hasil tangkapan.
- Tanpa listrik yang memadai, masyarakat juga kesulitan dalam mengakses informasi dan teknologi yang dapat membantu mereka dalam usaha.

3. Ketersediaan Air Bersih

- Akses terhadap air bersih masih menjadi masalah utama, di mana banyak penduduk mengandalkan sumber air yang tidak terjamin kebersihannya.
- Kualitas air yang buruk meningkatkan risiko penyakit, terutama di kalangan anak-anak, yang dapat mengganggu kesehatan dan produktivitas mereka.
- Keterbatasan dalam penyediaan air bersih juga mempengaruhi kegiatan sehari-hari, seperti memasak dan kebersihan, yang berdampak pada kualitas hidup secara keseluruhan.



Gambar 4.2 Kondisi Jalan Desa Perlis

4.4. Implikasi Temuan Peneliti

Hasil observasi ini menunjukkan bahwa upaya pengentasan kemiskinan di Desa Perlis memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi. Perbaikan infrastruktur, seperti pembangunan jalan yang layak dan aksesibilitas yang lebih baik, sangat penting untuk mendukung mobilitas masyarakat dan distribusi hasil perikanan ke pasar yang lebih luas. Dengan infrastruktur yang memadai, nelayan akan lebih mudah menjangkau pasar, sehingga mereka dapat menjual hasil tangkapan dengan harga yang lebih baik dan mengurangi ketergantungan pada tengkulak.

Selain itu, peningkatan akses pendidikan juga menjadi kunci dalam upaya pengentasan kemiskinan. Program pendidikan yang lebih baik dan pelatihan keterampilan bagi anak-anak dan remaja di desa ini akan membuka peluang bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan di luar sektor perikanan. Dengan

meningkatkan tingkat pendidikan, masyarakat akan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang lebih baik, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas hidup mereka dan membantu mereka keluar dari siklus kemiskinan.

Pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas juga merupakan solusi yang sangat penting. Melalui pengembangan usaha mikro dan kecil, masyarakat dapat diversifikasi sumber pendapatan mereka dan mengurangi ketergantungan pada sektor perikanan. Program pelatihan keterampilan yang difokuskan pada pengolahan hasil perikanan, budidaya ikan, atau usaha kreatif lainnya dapat memberikan alternatif pendapatan yang lebih stabil. Selain itu, dukungan dalam pemasaran hasil perikanan, seperti pembentukan koperasi nelayan atau akses ke platform pemasaran digital, akan membantu nelayan mendapatkan harga yang lebih adil untuk hasil tangkapan mereka.

Intervensi dari pemerintah dan lembaga terkait sangat diperlukan untuk mewujudkan semua inisiatif ini. Pemerintah dapat berperan dalam menyediakan dana, pelatihan, dan sumber daya yang diperlukan untuk mendukung program-program ini. Selain itu, kolaborasi dengan organisasi non-pemerintah dan sektor swasta juga dapat memperkuat upaya pemberdayaan masyarakat. Dengan pendekatan yang holistik dan kolaboratif, diharapkan masyarakat maritim di Desa Perlis dapat meningkatkan kesejahteraan mereka dan mengatasi tantangan kemiskinan yang mereka hadapi.

Maka dari itu Observasi langsung yang dilakukan peneliti menunjukkan bahwa kemiskinan di Desa Perlis dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk ekonomi, sosial, dan infrastruktur. Faktor ekonomi, seperti ketergantungan pada sektor perikanan dengan teknologi yang masih tradisional, menyebabkan

produktivitas yang rendah dan pendapatan yang tidak stabil. Di sisi sosial, rendahnya tingkat pendidikan dan kurangnya akses terhadap layanan kesehatan mempengaruhi kualitas hidup masyarakat. Sementara itu, infrastruktur yang buruk, seperti jalan yang sulit dilalui dan keterbatasan akses terhadap listrik dan air bersih, semakin memperburuk kondisi kehidupan masyarakat.

Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan langkah-langkah strategis yang terintegrasi dan berkelanjutan. Salah satu langkah penting adalah pengembangan teknologi perikanan yang lebih modern dan ramah lingkungan. Dengan memperkenalkan alat tangkap yang efisien dan teknik budidaya yang inovatif, nelayan dapat meningkatkan hasil tangkapan mereka dan mengurangi dampak negatif terhadap ekosistem laut. Selain itu, pelatihan keterampilan bagi nelayan dalam pengolahan hasil perikanan juga dapat membuka peluang baru untuk menciptakan produk bernilai tambah yang lebih menguntungkan.

Peningkatan akses pendidikan juga menjadi kunci dalam upaya pengentasan kemiskinan. Program pendidikan yang lebih baik, termasuk pelatihan keterampilan dan pendidikan vokasi, akan memberikan anak-anak dan remaja di Desa Perlis kesempatan untuk mengembangkan potensi mereka. Dengan pendidikan yang memadai, mereka akan lebih siap untuk memasuki dunia kerja dan memiliki peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik di luar sektor perikanan.

Perbaikan infrastruktur desa, seperti pembangunan jalan yang layak, penyediaan akses listrik yang memadai, dan pengadaan sumber air bersih, juga sangat penting. Infrastruktur yang baik akan mendukung mobilitas masyarakat dan mempermudah distribusi hasil perikanan ke pasar yang lebih luas. Dengan

akses yang lebih baik, nelayan dapat menjual hasil tangkapan mereka dengan harga yang lebih adil, sehingga meningkatkan pendapatan mereka.

Dengan langkah-langkah strategis ini, diharapkan masyarakat maritim di Desa Perlis dapat memiliki peluang yang lebih baik dalam meningkatkan taraf hidup mereka. Melalui kolaborasi antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat itu sendiri, upaya pengentasan kemiskinan dapat dilakukan secara efektif dan berkelanjutan, sehingga menciptakan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kemiskinan masyarakat maritim di Desa Perlis, Langkat, dapat disimpulkan bahwa kemiskinan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk ekonomi, sosial, dan infrastruktur, yang saling berinteraksi dan memperburuk kondisi masyarakat.

1. Faktor Ekonomi : Masyarakat Desa Perlis sangat bergantung pada sektor perikanan yang masih menggunakan metode tradisional, sehingga produktivitas mereka menjadi rendah. Ketergantungan pada tengkulak dalam pemasaran hasil tangkapan menyebabkan harga jual ikan yang rendah, sehingga pendapatan nelayan menjadi tidak stabil dan sering kali tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari. Selain itu, minimnya akses terhadap modal usaha menghambat pengembangan usaha alternatif yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membuat mereka terjebak dalam siklus kemiskinan yang sulit diubah
2. Faktor Sosial: Tingkat pendidikan yang rendah di kalangan masyarakat mengakibatkan terbatasnya peluang kerja di sektor lain, sehingga mereka sulit untuk keluar dari kemiskinan. Banyak anak-anak di desa ini tidak menyelesaikan pendidikan dasar karena harus membantu orang tua, yang mengakibatkan hilangnya kesempatan untuk mengembangkan keterampilan yang dapat membuka peluang kerja yang lebih baik di masa depan. Selain itu, kurangnya fasilitas kesehatan dan tenaga medis yang memadai berdampak pada rendahnya kualitas hidup masyarakat, di mana

mereka kesulitan mendapatkan perawatan yang diperlukan, terutama dalam situasi darurat.

3. Faktor Infrastruktur : Akses jalan yang kurang memadai menyulitkan distribusi hasil tangkapan ke pasar yang lebih luas. Kondisi jalan yang buruk, terutama saat musim hujan, menghambat mobilitas masyarakat dan meningkatkan biaya transportasi, yang pada gilirannya mempengaruhi harga jual hasil perikanan. Keterbatasan akses terhadap listrik dan air bersih juga memperburuk kondisi kehidupan masyarakat, di mana banyak rumah tangga yang belum terhubung dengan jaringan listrik dan mengandalkan sumber air yang tidak terjamin kebersihannya, meningkatkan risiko kesehatan.

Secara keseluruhan, kemiskinan di Desa Perlis merupakan masalah yang kompleks dan memerlukan intervensi yang terarah dari berbagai pihak, baik pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat. Pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan sangat penting untuk mengatasi tantangan ini. Upaya perbaikan infrastruktur, peningkatan akses pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas harus dilakukan secara simultan untuk menciptakan perubahan yang signifikan. Dengan kolaborasi yang baik antara pemerintah, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah, diharapkan masyarakat maritim di Desa Perlis dapat meningkatkan taraf hidup mereka dan keluar dari jeratan kemiskinan.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, beberapa saran yang dapat diberikan untuk mengatasi permasalahan kemiskinan di Desa Perlis adalah sebagai berikut:

1. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Maritim

- Meningkatkan akses terhadap modal usaha dan teknologi perikanan modern agar produktivitas dan pendapatan nelayan meningkat.
- Mendorong pembentukan koperasi perikanan untuk mengurangi ketergantungan pada tengkulak dalam pemasaran hasil tangkapan.

2. Peningkatan Akses Pendidikan dan Pelatihan

- Menyediakan program pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi masyarakat agar memiliki peluang kerja yang lebih luas di luar sektor perikanan.
- Mengadakan penyuluhan mengenai pengelolaan keuangan dan kewirausahaan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat.

3. Perbaikan Infrastruktur

- Meningkatkan kualitas jalan dan akses transportasi agar distribusi hasil tangkapan lebih mudah dan harga jual lebih kompetitif.
- Menyediakan fasilitas dasar seperti listrik dan air bersih untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

4. Penguatan Peran Pemerintah dan Lembaga Sosial

- Pemerintah daerah perlu berperan aktif dalam mengembangkan kebijakan yang mendukung kesejahteraan masyarakat maritim.
- Meningkatkan koordinasi dengan lembaga sosial untuk mendukung program pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat pesisir.

Dengan penerapan langkah-langkah di atas, diharapkan masyarakat maritim di Desa Perlis dapat keluar dari lingkaran kemiskinan dan mencapai tingkat kesejahteraan yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Aldwin, J. (2009). *Struktur sosial dan ekonomi nelayan tradisional: Studi hubungan patron-klien dalam komunitas maritim*. Pustaka Maritim.
- Arsyad, L. (2015). *Ekonomi Pembangunan: Edisi kelima*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Astrini, D. (2013). *Pendidikan dan kemiskinan: Analisis dampak tingkat pendidikan terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat*. Gramedia.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2009). *Statistik Nelayan Indonesia*.
- Bendavid-Val, A. (1974). *Regional and local economic analysis for practitioners*.
- Dawam Raharjo. (1999). *Intelektual, Intelegensia, dan Perilaku Politik Bangsa*. 355.
- Fachrudin, A. dalam Safari, B. (2006). *Kewirausahaan pemuda Betawi*. Deputi Bidang Kewirausahaan Pemuda dan Industri Olahraga Republik Indonesia.
- Hamdani. (2013). *Kemiskinan di Indonesia: Sebuah Analisis*. Pustaka Prima.
- Hartomo & Aziz dalam Laksono. (2021). *Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan*.
- Hoover, E. M. (1997). *An introduction to regional economics* (A. Chandra, Trans.).
- Koentjaraningrat. (1990). *Pengantar ilmu antropologi*. Rineka Cipta.
- Kuncoro. (2006). *Ekonomi pembangunan: Teori, masalah, dan kebijakan*.
- Kusnadi. (2000). *Nelayan : strategi adaptasi dan jaringan sosial*. 244.
- Meliala, D. (2012). *Kemiskinan di Indonesia: Sebuah pendekatan multidimensi*. Gramedia.
- Moleong, L. J. (2006). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Nawawi, H. (1992). *Metode penelitian bidang sosial*. Gadjah Mada University Press.
- Richardson, H. W. (n.d.). *Regional economics*.
- Safri, H. (2018). *Pengantar ilmu ekonomi*. Palopo: Lembaga Penerbit Kampus IAIN Palopo.
- Sani, S. R., Fitri, C. D., Amri, K., Muliadi, M., & Ikhsan, I. (2022). *Dampak*

Pandemi Covid-19 terhadap Pengangguran, Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan: Bukti Data Panel di Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 6(1), 107–115.

Setyadi, S., & Indriyani, L. (2021). Dampak pandemi Covid-19 terhadap peningkatan resiko kemiskinan di Indonesia. *PARETO: Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 4(1), 53–66.

Soekanto, S. (2003). *Sosiologi suatu pengantar*. PT raja Grafindo Persada.

Subandi, M. M. (2014). *Ekonomi Pembangunan*. Bandung: Alfabeta.

Suryawati, N. (2005). *Indikator kemiskinan dan strategi penanggulangannya*.

Tarumingkeng, R. (2002). *Kebijakan pembangunan dan kesejahteraan nelayan*.

Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2013). *Economic Development. Economic Development (Elevent)*. Erlangga dan Power Macintosh.

Wiguna. (2013). *Pendidikan dan Kemiskinan*. Gramedia.

Wijayanto. (2010). *Keterkaitan Pendidikan dan Kemiskinan*. Mitra Pustaka.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Hasri No. 3, Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN

No. Agenda: 4596/JDL/SKR/MAN/FEB/UMSU/19/11/2024

Kepada Yth.
Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di Medan

Medan, 19/11/2024

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Dini Pratiwi
NPM : 2105180010
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Konsentrasi : -

Dalam rangka proses penyusunan skripsi, saya bermohon untuk mengajukan judul penelitian berikut ini:

Identifikasi Masalah

Judul- 1 : Desa Perlis mengalami tingkat kemiskinan yang cukup tinggi, yang kemungkinan disebabkan oleh beberapa faktor seperti rendahnya produktivitas pertanian, akses yang terbatas terhadap teknologi dan modal, serta kurangnya pengetahuan dalam praktik pertanian modern. Upaya pengentasan kemiskinan di desa ini memerlukan program yang efektif, terutama yang berfokus pada peningkatan produktivitas pertanian sebagai sumber penghasilan utama masyarakat. Program tersebut diharapkan dapat mengatasi kendala yang ada dan meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga mampu mengurangi tingkat kemiskinan di Desa Perlis.

Judul- 2 : Perempuan dalam rumah tangga nelayan di Desa Perlis memiliki peran penting dalam ekonomi keluarga, terutama melalui pekerjaan sebagai pembelah ikan cerebung. Namun, kontribusi ekonomi mereka sering kali kurang diakui secara formal, dan peran ini cenderung diabaikan dalam perencanaan ekonomi desa. Masalah yang diidentifikasi meliputi: bagaimana peran perempuan ini berkontribusi terhadap penghasilan rumah tangga, tantangan apa yang mereka hadapi dalam menjalankan pekerjaan tersebut, dan sejauh mana dukungan sosial dan ekonomi yang mereka terima untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Judul- 3 : Meskipun Program Keluarga Harapan (PKH) telah diterapkan di Kelurahan Terjun, Medan Marelan, tingkat kemiskinan di wilayah tersebut masih menjadi tantangan signifikan. Perlu dilakukan evaluasi terhadap efektivitas kebijakan PKH untuk mengetahui sejauh mana program ini mampu menurunkan tingkat kemiskinan secara nyata. Adapun masalah yang diidentifikasi adalah apakah pelaksanaan PKH di wilayah ini berjalan sesuai dengan tujuan awal, serta apakah ada faktor-faktor tertentu yang menghambat optimalisasi program tersebut dalam membantu keluarga penerima manfaat mencapai kehidupan yang lebih baik.

Rencana Judul

1. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Di Desa Perlis Dan Upaya Pengentasannya Melalui Program Peningkatan Produktivitas Pertanian.
2. Peran Perempuan Dalam Ekonomi Rumah Tangga Nelayan Di Desa Perlis : Studi Kasus Tentang Pembelah Ikan Cerebung.
3. Evaluasi Efektivitas Kebijakan Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Mengurangi Tingkat Kemiskinan Di Kelurahan Terjun Medan Marelan.

Objek/Lokasi Penelitian : Desa Perlis Berandan Barat & Medan Marelan

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

Hormat Saya
Pemohon


(Dini Pratiwi)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN

Nomor Agenda: 4596/JDL/SKR/MAN/FEB/UMSU/19/11/2024

Nama Mahasiswa : Dini Pratiwi
NPM : 2105180010
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Konsentrasi : -
Tanggal Pengajuan Judul : 19/11/2024
Nama Dosen Pembimbing : Dr. Sylvia Vianly Ranita, SE, M.G.

Judul Disetujui : Analisis Kemiskinan Masyarakat Maritim
di Desa Pesisir Kecamatan Berandan
Barat Kabupaten Langkat

Disahkan oleh:
Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan

(Dr. Prawidya Hariani RS., SE., M.Si.)

Medan, 24-12-2024

Dosen Pembimbing

(Dr. Sylvia Vianly Ranita, SE, M.G.)

Keterangan

*) Disahkan oleh Ketua Program Studi

**) Disahkan oleh Dosen Pembimbing

Setelah disahkan oleh Prodi dan Dosen pembimbing, scan foto dan uploadlah tembaran ke-2 ini pada form online "Upload Penetapan Judul Skripsi"



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://feb.umsu.ac.id>

feb@umsu.ac.id

[umsuMEDAN](https://www.facebook.com/umsuMEDAN)

[umsuMEDAN](https://www.instagram.com/umsuMEDAN)

[umsuMEDAN](https://www.twitter.com/umsuMEDAN)

[umsuMEDAN](https://www.youtube.com/umsuMEDAN)

PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA

NOMOR : 1093 / TGS / II.3-AU / UMSU-05 / F / 2025

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan Persetujuan permohonan judul penelitian Tugas Akhir / Jurnal dari Ketua / Sekretaris :

Program Studi : **Ekonomi Pembangunan**

Pada Tanggal : **19 Oktober 2024**

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Tugas Akhir/ Jurnal Mahasiswa :

Nama : **Dini Pratiwi**

N P M : **2105180010**

Semester : **VIII (Delapan)**

Program Studi : **Ekonomi Pembangunan**

Judul Proposal / Skripsi : **Analisis Kemiskinan Masyarakat Maritim Di Desa Perlis Kecamatan Berandan Barat Kabupaten Langkat**

Dosen Pembimbing : **Dr. Sylvia Vianty Ranita, SE., M.Si.**

Dengan demikian di izinkan menulis Tugas Akhir / Jurnal dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Tugas Akhir/ Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Tugas Akhir / Jurnal harus berjarak 3 bulan setelah dikeluarkannya Surat Penetapan Dosen Pembimbing Tugas Akhir
3. **Tugas Akhir** dinyatakan " **BATAL** " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : **25 Maret 2026**
4. Revisi Judul.....

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 25 Ramadhan 1446 H
25 Maret 2025 M



Dekan

Dr.H. JANURI, SE.,MM.,M.Si., CMA
NIDN : 0109086502

Tembusan :

1. Pertinggal.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : DINI PRATIWI
NPM : 2105180010
Tempat / Tgl Lahir : Medan, 19 Agustus 2003
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jl. Kapt. Rahmadbudin Gg. Pipa Link. 8
Anak Ke : 3 dari 3 bersaudara
Email : dinipratiwi1908@gmail.com
No Hp/ WA : 0882-0162-3855

Nama Orang Tua

Ayah : Rudi Replianto
Pekerjaan : Wiraswasta
Ibu : Tuti Handayani
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jl. Kapt. Rahmadbudin Gg. Pipa Link. 8
No. Telepon : 0812-6460-5707

Pendidikan Formal

1. SDN 060954 Marelان Tamat Tahun 2015
2. SMP Swasta Al Hikmah Medan Tamat Tahun 2018
3. SMA Negeri 16 Marelان Tamat Tahun 2021
4. Kuliah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Tahun 2021 s/d Sekarang

Medan, 25 Maret 2025



DINI PRATIWI